

BIDIK

NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

Survei ARCI, Bupati Hendy Unggul di Pilbup Jember

JEMBER, BN - Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) kembali merilis hasil survei tentang peta politik Pilbup Jember. Hasil survei yang dilakukan periode 23 Juni hingga 5 Juli 2024 itu menunjukkan elektabilitas Bupati Jember Hendy Siswanto berada di posisi tertinggi.

"Ada 4 nama yang masuk (survei), yakni Hendy Siswanto, Muhammad Fawait, Faida dan Gus Jaddin," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt, Sabtu (13/7/2024).



■ Bersambung ke hal.11 kol.6 Bupati Jember Hendy Siswanto. (ist)

Perkuat Pendidikan Karakter, Bupati Ipuk Salurkan Insentif Guru Semua Agama



Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memberikan insentif tahunan kepada guru rohani semua agama.

BANYUWANGI, BN - Corak keberagaman yang inklusif dan moderat terus ditekankan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Hal ini terlihat diantaranya dengan memperkuat peranan guru rohani semua agama dengan memberikan insentif tahunan.

"Mohon jangan dilihat nominalnya, tapi ini adalah bentuk komitmen Pemkab Banyuwangi untuk memajukan pendidikan agama di daerah ini," ungkap Ipuk saat penyaluran insentif guru agama di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Selasa (30/7/2024).

Guru agama yang menerima insentif kali ini adalah para pengajar di lembaga-lembaga pendidikan non-formal keagamaan. Seperti sekolah minggu di gereja dan sebagainya. Sasarannya meliputi agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu.

"Selama ini, Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan insentif bagi guru ngaji (Islam). Kali ini, kita perluas kepada guru-guru dari agama lainnya," terang Ipuk.

Dengan penambahan insentif tersebut, imbuh Ipuk, akan memberikan stimulus semangat untuk memperkuat kerohanian dan spiritualitas di kalangan anak-anak yang menempuh pendidikan.

"Kita semua ingin anak-anak Banyuwangi bukan hanya jago sains, tapi juga memiliki pengetahuan agama yang mumpuni serta mewarisi semangat kebudayaan lokal. Kami juga mengingatkan pentingnya pemahaman agama yang moderat untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga bisa turut berkolaborasi bersama menjaga keutuhan daerah kelak," paparnya.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banyuwangi yang mengkoordinasi penyaluran itu menyebutkan tahun ini ada 200 guru agama yang menerima. Masing-masing mendapatkan Rp700 ribu. "Semoga di tahun mendatang jumlah penerima bisa terus bertambah," harap Ketua FKUB Nur Chozin.

(Adv/Dj/Edy/Hms)

Banggar DPRD Banyuwangi dan TAPD Tuntaskan Pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2024



Suasana Rapat Banggar di kantor DPRD Banyuwangi. (ist)

BANYUWANGI, BN - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menuntaskan pembahasan dan pendalaman Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) perubahan APBD Tahun 2024, Jum'at (2/08/2024).

Rapat yang digelar secara maraton yang dimulai pada hari Rabu (31/07) itu menyepakati target pendapatan asli daerah (PAD) dalam KUPA PPAS Perubahan APBD 2024 yang semula sebesar Rp. 605 miliar menjadi sebesar Rp. 620 miliar.

Wakil Ketua DPRD, Rullyono, SH, selaku pimpinan Banggar mengatakan, dalam KUPA-PPAS perubahan APBD 2024, pihaknya mendorong Pemerintah daerah untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah.

"Peningkatan PAD itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian Daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah," ucap Rullyono saat dikonfirmasi Awak Media. Menurut Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi tersebut, hingga saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemda dalam menemukan keunggulan dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dalam rapat Banggar tadi, sudah kita beri solusi agar pemda secepatnya membuat badan usaha daerah aneka usaha seperti produksi air minum kemasan yang dikelola oleh SDM profesional dan Pemda juga harus memaksimalkan Pengelolaan Aset daerah," ucapnya.

Rullyono mengatakan, di era otonomi daerah saat ini, setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diantaranya kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan, aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. "Untuk meningkatkan PAD sekaligus mencegah potensi defisit anggaran, kita juga memberikan masukan kepada Pemda untuk segera menindaklanjuti saran kita agar segera mengalihkan saham tambang emas di PT Merdeka Cooper Gold menjadi Dana Abadi," ucapnya.

Rullyono berasumsi, seluruh saham yang nantinya dijual kemudian didepositokan ke Bank Pemerintah sebagai dana abadi dan bunganya bisa menjadi penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD. "Kami percaya bahwa pengalihan saham Pemkab. Banyuwangi di PT MCG ke Dana Abadi adalah langkah yang tepat dan strategis. Dana tersebut tidak akan habis dan bisa digunakan untuk kepentingan jangka panjang masyarakat dan akan membantu menciptakan lebih banyak peluang dan manfaat bagi anak cucu kita," ucap Rullyono.

Sementara, dikonfirmasi terpisah Sekretaris Daerah, Ir. Mujiono selaku Ketua TAPD membenarkan bahwa Dewan mendorong pemda untuk meningkatkan PAD berdasarkan potensi dan perkembangan yang ada. "Target PAD kita naikan dari semula Rp. 605 miliar menjadi Rp. 620 miliar," ucap Mujiono.

Upaya peningkatan PAD dalam KUPA-PPAS perubahan APBD tahun 2024 bersumber dari memaksimalkan Pengelolaan Aset Daerah, optimalisasi pajak parkir, pajak hotel dan restoran serta pajak jaringan internet yang selama ini masih belum tergal secara maksimal. "Akan kita maksimalkan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui tax monitor," pungkasnya. (Adv/Dj)





BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Mengucapkan

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 2024



IMAM HIDAYAT, S. SOS, MM
KEPALA BIRO KESRA JAWA TIMUR



NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU



ADHY KARYONO, A.KS., M.AP
Pj. Gubernur Jawa Timur

H Subandi Dapat Dukungan Para Kyai, Dalam Kontestasi Pilkada Sidoarjo



Plt Bupati Sidoarjo H Subandi (kanan), KH Abdussalam Shohib (kiri), Gus Abdurrahman Kautsar (tengah). (Teddy)

SIDOARJO, BN - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun PKB ke 26 DPC PKB Sidoarjo gelar fun football di Lapangan Pagerwojo. Momen tersebut dimanfaatkan untuk berkumpulnya bagi para Gus (Putra Kyai). Seperti, Muhammad Abdurrahman Kautsar atau Gus Kautsar, KH Abdussalam

Oleh karenanya, ia akan memberi dukungan penuh pada Subandi, untuk dapat menang dalam Pilkada yang akan dihelat 27 November 2024, mendatang.

"Kami mendukung ia dapat menjadi pemimpin daerah, apalagi (Subandi) teman sendiri kan, pasti kami dukung," ucapnya selepas bermain sepak bola.

Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso desa Ploso, KH Nurul Huda Djazuli itu berharap, Sidoarjo dapat lebih baik di tangan Subandi. "Semoga, Sidoarjo ditangan Pak Subandi ini bisa menarik, tertata, semoga apa yang dilakukannya juga dapat membawa berkah," ujarnya.

Sementara itu, Subandi

merasa terhormat, kegiatan fun football kehadiran para kyai muda. Dia ingin dengan kehadiran mereka dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan terutama antara PKB dan Nahdlatul Ulama.

"Dengan dukungan para Gus (Kyai muda, red) semoga saja Sidoarjo dapat lebih tertata dan tidak ada sekat lagi antara ulama dan umara dalam membangun Sidoarjo," katanya.

Mendapatkan dukungan dari para kyai muda, ia mengaku semakin bersemangat dalam menghadapi Pilkada. "Mudah-mudahan dari para Gus (Kyai muda) hadir menjadi doa dan suport kami untuk mengarungi Pilkada 2024," pungkasnya.

(Teddy)

Gedung Baru RS Siti Khodijah Sidoarjo, Bakal Digunakan Fakultas Kedokteran Umsida



Prof. Dr Haedar Nashir, bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, saat potong pita peresmian gedung baru RS Siti Khodijah Sidoarjo (Teddy Syah Roni)

SIDOARJO, BN - Gedung Medik Tahap 3 Rumah Sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Diresmikan oleh Menko Bidang PMK Muhadjir

Effendy dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sabtu (10/8/2024).

Gedung Medik tahap 3, setinggi tujuh lantai tersebut menyediakan kamar rawat inap standar (KRIS) dan perbaikan fasilitas layanan stroke, isolasi, kemoterapi serta rehab medik. Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah (RSSK) Dr. H. Muhammad Hamdan, dalam sambutannya, menyatakan rasa bangganya atas terrealisasinya pembangunan gedung medik tahap tiga RSSK ini. "Rumah sakit Muhammadiyah Siti Khodijah ini akan direncanakan menjadi rumah sakit Pendidikan fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. RSSK ini luar biasa hampir setiap tahun ada saja yang dibangun dan proses peresmian." kata Hamdan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr Haedar Nashir, menegaskan Muhammadiyah siap bekerjasama dengan pemerintah dan komponen bangsa untuk selalu membangun kepentingan umat dan bangsa.

"Point penting, kami Muhammadiyah bekerjasama dengan pemerintah dan berbagai kelompok serta berbagai komponen bangsa yang lain, kami selalu ingin membangun untuk kepentingan umat dan bangsa. Baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan sekarang kesehatan," ungkap Haedar Nashir.

Prof Haedar menambahkan, kenapa Muhammadiyah terus membangun karena Muhammadiyah ini organisasi Islam yang urusannya bukan hanya ibadah dan spiritual, namun juga urusan keduniawian. Tidak lain untuk kemaslahatan orang banyak.

Dia menyebutkan, di Jawa Timur juga ada 37 rumah sakit Muhammadiyah yang patut untuk dibanggakan, dengan menggunakan produk karya Muhammadiyah sendiri yang kualitasnya diatas produk lainnya.

(Teddy)

Camat Temayang Buka Turnamen Bola Voli Pancur Cup ke 8

BOJONEGORO, BN - Dalam rangka menyemarakkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke 79, Pemerintah Desa (Pemdes) Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan ajang bergengsi pembukaan Turnamen Bola Voli Pancur Cup ke 8 tahun 2024 di lapangan Pancur, Senin (12/8/2024), malam.

Acara ini sangat meriah dan mengundang perhatian 1500 penonton. Dalam laga pembuka turnamen kali ini, tim voli Tegal kodo MBOYS dari Desa Tegalkodo kecamatan Sukosewu berhadapan dengan tim voli situasi bangkit asal Desa Sitiaji Kecamatan yang sama.



Laga pembuka Turnamen Bola Voli Pancur Cup ke 8 tahun 2024, tim voli Tegal kodo MBOYS Desa Tegalkodo Vs tim voli situasi bangkit Desa Sitiaji di lapangan Pancur (12/8/2024). (pri)

Masing-masing tim tampak membawa ratusan supporter fanatiknya untuk memberikan sport dan dukungan untuk kemenangan timnya. Nampak tribun yang disediakan panitia penyelenggara penuh dengan para penonton. Masyarakat sekitar sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

Sementara, Kepala Desa Pancur, H. Lulus Pujiono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu kelancaran Turnamen Pancur Cup ke 8. "Semoga turnamen ini bisa kita agendakan setiap. Ke-

pada panitia keamanan baik dari Polsek, Koramil, Satpol PP dan Linmas Desa Pancur yang telah membantu kegiatan ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Kapolsek Temayang, AKP. Eko Suwanto dalam sambutannya menghimbau kepada para penonton atau supporter masing-masing tim untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama pertandingan berlangsung.

"Jangan sampai terjadi hal yang tidak kami inginkan. Semoga pertandingan berjalan lancar sampai usai," tegasnya. Acara Turnamen Bola Voli Cup ke 8 dibuka langsung oleh Camat Temayang, Moch. Basuki S.Pd.

(pri)

Deltras FC Nunggak Sewa Stadion Gelora Delta Rp 450 Juta

SIDOARJO, BN - Muncul kabar kurang baik menerpa klub kebanggaan Sidoarjo. Deltras FC menunggak pembayaran sewa Stadion Gelora Delta Sidoarjo (GDS). Tak tanggung-tanggung, dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), The Lobster menunggak Rp.452.198.000,-.

Piutang The Lobster untuk sewa stadion itu diketahui terjadi pada 2011 sampai 2014 sebesar Rp.372.198.000,- yang terdiri dari nilai pokok piutang Rp.364.900.000,- dan denda dua persen dari pokok piutang, sehingga nominalnya sebesar Rp.7.298.000,-.

Pemberlakuan denda 2 persen selama satu bulan tersebut merupakan kebijakan dari Kepala Disporapar Sidoarjo tahun 2016-2017, dan mulai dikenakan pada tahun 2016. Denda tersebut nilainya tidak berubah sampai masa laporan keuangan tahun anggaran 2023.

Kemudian di tahun 2022 lalu, Deltras FC kembali menunggak membayar sewa stadion saat berlaga di Liga 3, untuk sekali main nilai sewanya sebesar Rp.4.000.000,-. Jika ditotal mencapai Rp.80.000.000,- tunggakan tersebut belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo Yudhi Irianto saat ditemui membenarkan bahwa, ada tunggakan pembayaran sewa stadion GDS seperti yang menjadi temuan dalam audit BPK. "Sampai saat ini masih belum ada pelunasan dari manajemen Deltras," ungkap Yudhi saat ditemui di Kantor Disporapar Sidoarjo



Kepala Disporapar, Yudhi Irianto. (Teddy)

Dia menambahkan, Disporapar dan perwakilan Deltras sudah melakukan mediasi dengan BPK. Dalam mediasi tersebut, manajemen Deltras sudah menandatangani berita acara siap membayar atau melunasi. "Tapi sampai sekarang tak kunjung dilunasi. Kami sudah melakukan penagihan dengan kirim surat pada pihak Deltras," ujar Yudhi.

Setiap dilakukan penagihan, manajemen Deltras mengaku sanggup membayar dan melunasi. Kapan? mereka tidak memberikan waktu, hanya menyampaikan bakal menyelesaikan masalah tersebut. "Ini kan sudah menjadi tanggung jawab mereka. Kalau ini tidak kunjung diselesaikan, takutnya masalah ini akan lari kemana-mana. Itu yang kami khawatirkan," kata Yudhi Irianto.

Dia menegaskan, untuk masalah piutang sewa stadion Gelora Delta Sidoarjo, Disporapar akan terus melakukan penagihan. "Yang bisa kami lakukan adalah terus melakukan penagihan," ujarnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapps, CEO Deltras FC Amir Burhanudin menyebutkan, pada intinya menjelaskan, kalau piutang yang tahun 2011 sampai dengan 2024 itu bukan tanggungjawab dirinya. "Untuk konfirmasi lebih lanjut, tanyakan pada manajer Deltras FC yaitu, Dian Felani," ungkapnya saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp pribadinya. Namun, saat dikonfirmasi hingga Minggu (11/8/2024) pagi, Dian Felani terkesan enggan merespon klarifikasi BN. (Teddy)

Pemkab Sidoarjo Terima Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Pusdiklat Kementerian Kominfo Tahun 2024



Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman menerima Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan XVIII tahun 2024 Pusdiklat Kementerian Kominfo. (ist)

SIDOARJO, BN - Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman, mewakili Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi menerima Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan XVIII tahun 2024 Pusdiklat Kementerian Kominfo dengan tema Inovasi Digital Pada Tata Kelola Pemerintah Yang Berwawasan Ke Depan yang bertempat di Delta Wicaksana, Selasa (6/8).

Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua rombongan Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan XVIII selaku Pimpinan Pusdiklat Kementerian Kominfo Baso Saleh, Pendamping Widyaiswara Jonathan Judianto, Ketua tim penyelenggara bidang manajerial Annisa Nurul Aini Firdaus serta jajaran OPD Kabupaten Sidoarjo yang terkait.

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M. Ainur Rahman dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada para peserta Visitasi Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan XVIII tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Dirinya sangat mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan kerja tersebut.

"Suatu kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, karena dipilih sebagai lokus visitasi peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII. Selain itu, kunjungan ini mempunyai nilai strategis untuk memperkenalkan Kabupaten Sidoarjo," ujar M. Ainur Rahman.

M. Ainur Rahman juga menjelaskan secara singkat tentang Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 714,24 KM2. Dengan batas sebelah utara adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah Timur adalah Selat Madura dan sebelah Barat Kabupaten Mojokerto. Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan yang terbagi dalam 322 Desa dan 31 Kelurahan, yang dihuni kurang lebih 2.002.830 jiwa.

Kegiatan Visitasi tersebut mengambil tema Inovasi Digital pada Tata Kelola Pemerintah yang Berwawasan ke depan. Tema tersebut diambil karena pemerintah dituntut untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Teknologi digital bukan hanya alat, tetapi juga pendorong utama dalam transformasi tata kelola pemerintah. (yah)

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK
NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'ufi Santoso, Abd Rossi. SIDOARJO : Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holillurohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/TRENGGALEK : Nik Atin. MADIUN : Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Sulistiowati, Arif Mustofa. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Nino Wiwantara. BLITAR

: Budi Sastro. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto, PROBOLINGGO/LUMAJANG : Sonny Narwani. JEMBER : Agus Budiono. SITUBONDO : Agung Chormelis (Kabiro), Hari Sulisty. BONDOWOSO : Rukwandanu. BANYUWANGI : Djoni DW (Kabiro), Suropto, Sugeng Purnomo. JAWA TENGAH : BLORA : Mugianto (Kabiro), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. REMBANG : Didik Eko Sulistiawan. WONOGIRI : Heryanto. SEMARANG RAYA : Peni Kusumawati (Kabiro), Catur Prasetyo.

PEKALONGAN RAYA : Sodikin (Kabiro), M. Khairul Anwar. BATANG : Rudiono (Kabiro), Bambang Hadi. KENDAL : Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. KUDUS : Budi Setiawan. GROBOGAN : Heru Budianto. SALATIGA : Susilo Haryadi. BOYOLALI : Hendarli. TEMANGGUNG : Ahmad Mukhlis (Kabiro), Novan Argunanto. JAWA BARAT : CILACAP : Asep Saepudin (Kabiro), Eko Prionggo Dewo, Suharto, Suyatno. MAGELANG : Marno, ST. BANDUNG : Zaenal Ikhsan (Kabiro). CIAMIS/KOTA

BANJAR/PANGANDARAN : Asep Sujana. SUMEDANG : Ernawan Hidayat. SUBANG : Tohir (Kabiro), Sumantri, Anay, Kandiawan. INDRAMAYU : Candra Shema Restullah (Kabiro), Ragil Pangestu. DEPOK : Harahap (Kabiro), Fajar. BEKASI : Abdul Rachman. KUNINGAN : Edwar Panata Muda. PURWAKARTA : Anthon Pontoh, Endin. BOGOR : Liswandi (Kabiro), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. JAKARTA/BANTEN : Ayom Cahyono (Kabiro), Dian Wahyudi. BALI : Agung Wiarto. SULAWESI SELATAN : SOPPENG/WAJAO : Anwar Paturusi (Kabiro). PINRANG : Moh Sabir (Kabiro), Subhan Hapid. BONE : Edy Suspi AB. SULAWESI UTARA : MANADO : Affandi Masloman. KOTAMOBAGU : Arman Muna (Kabiro), Moh Setio Wanoto. GORONTALO : Riffly Tama'un. HALMAHERA SELATAN : Anwar Suleman. KALIMANTAN TENGAH : MURUNG RAYA/BARITO UTARA : Effendi (Kabiro). KALIMANTAN BARAT : KETAPANG : Sukarto. KALIMANTAN UTARA : Syamsudin (Kabiro).

KEPRI : BENGKALIS : Agung Mulyono. KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN : Handoko KEP NATUNA : Amir Hamzah. RIAU : Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMANG : Siriani. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OGAN KOMERING ULU/KO SELATAN : MAZahry MY, OKI : Nurlis Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN : Muhammad Syafei Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennang Tumangger. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. ASAHAN : Tumin P, Sandro Natanael Hulu, Hengky Arnes. NIAS UTARA : Hadirat Syukur Harefa. NIAS BARAT : Odaligo Zai. TAPANULI SELATAN : Amir Hamzah Nasution

SUMATERA BARAT : PASAMAN : Suryadama (Kabiro), Refidinal. LAMPUNG : WAY KANAN : Arye M Jahri. LAMPUNG TIMUR : Nuhnyin, Mueshin, Antoni. LAMPUNG UTARA : Eka Saputra (Kabiro), Triyutika Sari LAMPUNG SELATAN : Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. LAMPUNG BARAT / PESIR BARAT : M. Taufik TULANG BAWANG/TULANG BAWANG BARAT : Indra Wijaya, Hendra Jaya. PRINGSEWU : Iskandar. B. BANDAR LAMPUNG : Suhartono Hariwibowo. TANGGAMUS : - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Dirmanto, Sutrisno. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bacin (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL : Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG : Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI. TANJUNG JABUNG BARAT : Joni Efendi. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM : Hidayatul Aini (Kabiro). LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN : Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO : 0220105231819. NPWP : 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Tlp. 021-53661085. BANK : Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasiona.com.Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasiona@yahoo.com/ bidiknasiona1@gmail.com/bidiknasiona2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Pengadaan Kalender Tahun 2024 DPRD Jombang Diduga Berbau Korupsi

Rehab Ruang Banmus Ketua Dewan Patut Disorot

JOMBANG, BN – Bambang Sriyadi Sekwan (Sekretaris dewan) dan Dhian Retno Nugraheni SE (Kabag Umum) sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Sekretariat DPRD Jombang diduga orang yang paling bertanggungjawab pada pengadaan kalender tahun 2022 anggaran tahun 2024.

Pada pengadaan kalender sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 karena diduga kuat ada "kong kalingkong" sebelum sistem elektronik/ e- katalog di jalankan, pemenang yang melaksanakan sudah di atur dan diduga peserta lain (rekanan) tidak ada, hanya salah satu rekanan yang ditunjuk. Itupun atas rekomendasi dari ang-

gota dewan yang ditunjuk oleh Sekwan.

Sedangkan Sekwan menurut sumber yang terpercaya, atas perintah Ketua dewan. Benar dan tidaknya masih meragukan karena ketua dewan masih belum berhasil ditemui oleh Bidik Nasional (BN). Jikalau itu benar, dugaan adanya KKN terkait pengadaan barang



Bambang Sriyadi Sekwan
DPRD Jombang. (Foto: ist)



Kalender tahun 2024, isi 6 halaman, menggunakan kertas AP 150 (lebih rendah kualitas dari AP 190) harga Rp 20.500,- (Foto: Tok BN.com)

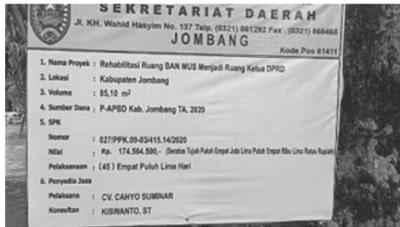
dan jasa di Gedung Dewan DPRD Jombang diduga ada penyalahgunaan wewenang ■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Rehab Ruang Banmus Diduga Tidak Sesuai Spek

POTRET buram gedung DPRD Jombang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sungguh memprihatinkan. Jadi jangan di bilang kasus lama, di bilang usang, sebelum aparat hukum bertindak. Apalagi dengan penggunaan uang negara, harus tetap di usut, karena uang negara harus dimanfaatkan secara transparan dalam penggunaannya. Seperti pada pengadaan rehab ruang Banmus menjadi ruang Ketua DPRD Jombang dianggarkan tahun 2020 sebesar Rp 174.564.500,00,-. Rehab tersebut dikerjakan oleh CV. Cahyo Suminar, beralamat di Ngoro, Jombang, pemilik salah satu ketua partai dan sekarang menjadi anggota dewan (diduga dari partai yang sama).

Pada rehab ruang Banmus menjadi ruang Ketua DPRD Jombang diduga tidak sesuai gambarnya (spek), sedangkan ada bangunan lama diduga masih belum dirubah, padahal dianggarkan Rp 174.564.500, sedangkan untuk pengadaan karpet Rp 37.000.000,- total kesemuanya Rp 211.000.000,- juga diduga tidak sesuai spek.

Menurut sumber terpercaya, "Pintu seharusnya digeser tetapi tetap ditengah, plafon seharusnya bongkar total ini tetap dan hanya di cat saja, ukuran karpet tidak sesuai



Papan proyek rehabilitasi ruang Ban Mus menjadi ruang Ketua DPRD Kabupaten Jombang. (Foto: ist)

dengan yang diinginkan," ujar nya. Pada rehab tersebut, ruang ketua dewan juga diduga dilakukan tidak sesuai dengan speknya. Pada rehab ruang banmus diduga kuat ada Mark-up atau tidak sesuai dengan gambar (spek). Pada pintu masuk ruang Ketua DPRD Jombang perlu kita soroti, antara lain:

1. Pas, pintu type P1 Aluminium, itupun cuma di ganti kayu triplek (sebenarnya menggunakan

aluminium)

2. Pas, jendela type P1 aluminium, diduga tidak ada, atau tidak di laksanakan untuk rehab

3. Pekerjaan langit-langit diduga tidak sesuai spek. Antara lain Pas, langit-langit, Pas langit-langit gipsium board 120x 240x 9, uga diduga tidak di ganti, karena masih bangunan lama, hanya di cat saja (plafon diduga total tidak dikerjakan)

Pada pekerjaan interior, (1) Pasang rangka dinding background Hollow 40/40 mm. (2) Pasang lapisan multiplek 12 mm (1.200x 2.400 x 13 mm) background. (3) Finishing wallpaper dinding, semuanya ada dugaan masih menggunakan bangunan lama (cuma di ganti HPK dan Wallpaper nya saja). (tok/bersambung edisi berikutnya)

Surabaya Panen Penghargaan ProKlim 2024, Dua Kampung Raih Kategori Lestari



Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi (Tengah). (ist)

SURABAYA, BN – Sebanyak 23 kampung di Kota Surabaya, meraih penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lingkungan setempat.

Pemberian penghargaan itu dilakukan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dalam puncak Fes-

tival LIKE 2 di Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024). Pada tahun ini KLHK membagi dalam dua kategori nominasi yaitu ProKlim Lestari (tinggi) dan ProKlim Utama.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengapresiasi kerja keras masyarakat dan berbagai pihak yang telah berhasil meraih penghargaan ProKlim dari Kementerian LHK. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi dan gotong-royong antara masyarakat, pemerintah serta stakeholder dalam menciptakan lingkun-

ngan yang lebih baik.

"Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang telah bekerja keras untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang peduli lingkungan. Penghargaan ini merupakan motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Minggu (11/8/2024).

Ia mengungkapkan bahwa ada dua kampung di Surabaya yang berhasil meraih Trophy ProKlim Lestari atau penghargaan kategori tertinggi dari Kementerian LHK. Kedua kampung itu adalah Kelurahan Pagesangan dan RW 1 Banjar Sugihan. "Jadi untuk bisa menjadi ProKlim Lestari itu harus membina 10 ProKlim Utama," tuturnya.

Selain ProKlim Lestari, Kementerian LHK juga

memberikan penghargaan ProKlim Utama kepada 21 kampung iklim di Kota Surabaya. Di samping dua kategori penghargaan itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga menerima penghargaan berupa Piagam Apresiasi Pembina ProKlim Tahun 2024. "Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Kementerian LHK kepada pemerintah kota karena telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan ProKlim," ujar Wali Kota Eri.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengungkapkan salah satu faktor dua kampung di Surabaya berhasil meraih ProKlim Lestari. Salah satu faktor itu karena kedua lokasi ini telah melakukan berbagai inovasi yang berdampak positif pada lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup warganya. (Red/Humas)

Dandim Surabaya Utara Hadiri Acara Sertijab Dandim 0816/Sidoarjo

SIDOARJO, BN – Dandim 0830/Surabaya Utara Kolonel Inf Dharmawan Setyo Nugroho, S.I.P. bersama Ketua Persit KCK Cabang XLIX Dim 0830 Ny. Santi Dharmawan hadir Acara Serah Terima Jabatan Dandim 0816/Sidoarjo bertempat di Aula Makodim 0816/Sidoarjo, Jalan Lingkar Timur No.3, Area Sawah, Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Senin (5/8).

Tongkat komando kepemimpinan Kodim 0816/Sidoarjo berganti. Jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0816/Sidoarjo secara resmi diserahkan kepada Letkol Inf Guntung Dwi Prasetyo kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos.

Saat Pimpin Acara Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Yusman Madayun, S.I.P. dalam sambutannya mengatakan, pergantian ini merupakan bagian dari rotasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat yang bertujuan untuk penyegaran organisasi dan pening-



Serah Terima Jabatan Dandim 0816/Sidoarjo. (ist)

katan kinerja. Kepada Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S. Sos., dengan pengalaman dan dedikasi yang dimilikinya, diharapkan dapat melanjutkan serta meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai oleh pejabat lama.

"Saya berharap kepada Dandim 0816/Sidoarjo yang baru Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, S.Sos. segera orientasi tugas, laksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, lakukan terobosan dan inovasi yang konstruktif dalam melaksanakan tugas sehingga setiap tugas dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan tuntas", harapnya.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Letkol Inf Guntung Dwi Prasetyo atas semua upaya, dedikasi dan kerja keras yang telah disumbangkan kepada Korem 084/Bhaskara Jaya selama ini, dan saya do'akan semoga dapat mengemban tugas dengan baik dan sukses selalu di tempat yang baru", pungkas Danrem. (yah)

Merasa Tertipu Rp 2,6 M, Kuasa Hukum Eko Budi Laporkan Oknum DPRD Sidoarjo Ke Polda Jatim



M. Nailun Amani, Kuasa hukum Eko Budi, setelah melaporkan oknum DPRD Sidoarjo ke Polda Jatim. (Ist)

SIDOARJO, BN – Eko Budi, warga Sidoarjo, melalui kuasa hukumnya M. Nailun Amani melaporkan seorang oknum DPRD Kabupaten Sidoarjo ke Polda Jatim. Laporan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas jual beli tanah di kawasan desa Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Sidoarjo.

Laporan itu dilakukan Eko ke Polda Jatim lantaran dinilai oknum DPRD berinisial KY tersebut belum ada itikad baik, sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2,6 miliar.

Kuasa Hukum Korban, M. Nailun Amani mengatakan, kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan bermula saat kliennya ditawarkan oleh oknum berinisial KY yang merupakan Anggota DPRD di Kabupaten Sidoarjo untuk membeli sebuah tanah yang terletak di kawasan Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon Sidoarjo.

Jumlah tanah tersebut sebanyak 15 bidang dengan total luasan mencapai 4.000 meter persegi. "Tepatnya ditahun 2022, klien kami ditawarkan untuk membeli sebuah tanah di kawasan Prambon, pada saat itu oknum ini menyampaikan bahwa tanah itu nantinya akan dibeli oleh dinas pendidikan untuk pembangunan sekolah," jelas Nailun Amani saat ditemui di kantornya kantor hukum Defirmasi Law Firm, Jumat, (9/8/2024).

Mendapat iming-iming keuntungan besar, Kliennya pun akhirnya menyetujui pembelian tanah tersebut. Saat itu, kliennya juga sempat menipiskan uang ke oknum anggota DPRD tersebut serta membayar sejumlah uang pembelian tanah kepada para petani disana. Totalnya, mencapai Rp.2,6 miliar.

"Waktu itu (terlapor) menyampaikan ketika nantinya tanah tersebut dibeli oleh dinas, maka kami akan mendapatkan keuntungan besar. Klien kami pun setuju untuk membeli dan juga sudah dilunasi bulan November 2022," terangnya.

Selain sudah melunasi pembelian tersebut, kliennya juga dimintai beberapa dokumen seperti KTP, KK dan Buku nikah. Dokumen tersebut diperuntukkan kepengurusan balik nama surat-surat. Belum sempat menikmati hasil, kliennya akhirnya mengetahui bahwa tanah tersebut saat ini bukan atas nama dirinya, dan sudah diperjualbelikan kepada pihak lain.

"Jadi, klien kami saat itu dijanjikan dengan dua keuntungan. Pertama dengan keuntungan (hasil) besar atas pembelian tanah tersebut, dan kedua dijanjikan pengurusan balik nama tanah tersebut. Tapi saat ini tanah itu sudah berpindah tangan atas nama orang lain yakni berinisial SA (turut dilaporkan) dan sudah dijual lagi ke Dinas Pendidikan pada tahun 2023," terangnya.

Informasi tersebut diketahui setelah dia dan kliennya meminta klarifikasi langsung ke Dinas Pendidikan terkait status tanah tersebut. "Seandainya kita tidak tanya sama Dinas, mungkin kami tidak mengetahui kalau tanah itu sudah diperjualbelikan kembali. Sebab tidak ada informasi apapun terkait itu. Saat ditanya, bilangannya masih proses balik nama, sampai-sampai kami mendapat informasi bahwa tanah tersebut sudah beli dan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan," tandasnya. Sementara itu, Oknum Anggota DPRD inisial KY ini, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapps di nomor 0812307XXX8, nomor tersebut sudah tidak aktif. (Ted)

Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk Patut Diawasi



NGANJUK, BN – Masih banyak modus korupsi meskipun pengadaan barang dan jasa (PBJ) sudah menggunakan platform elektronik. Sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah yang masih subur praktik korupsi. Pajalnya, korupsi di sektor PBJ masih menjadi kasus tindak pidana korupsi terbesar kedua, di bawah gratifikasi dan penyuaan.

Seperti halnya di Dinas PUPR Nganjuk, patut disorot terkait PBJ dengan sistem e - Katalog. Praktik suap sangat erat dengan pengadaan barang dan jasa. Banyak vendor yang melakukan penyua-

apan agar laporannya dinyatakan baik saat proses audit. Adanya sistem e- procurement, semua dokumen harus di - upload melalui komputer. Tapi yang terjadi ternyata sistem tersebut juga bisa di akal. Para vendor membuat kesepakatan di luar, mengatur harga dan mengatur siapa yang menang. Sudah banyak upaya pemerintah dalam meminimalisir korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Salah satu upaya yang tengah digencarkan pemerintah yakni melalui e- Katalog.

Pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui elektronik semakin populer digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses PBJ pemerintah. Kendati demikian, masih banyak modus korupsi yang dilakukan meskipun PBJ sudah menggunakan platform elektronik.

Kita soroti pada PBJ sistem purchasing di Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk ini masih ada modus yang berpotensi korupsi. Menurut sumber BN, coba dicermati, apakah melalui platform e- Katalog tidak ada korupsi.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Perubahan APBD Difokuskan Pada Peningkatan Anggaran Sektor Prioritas



Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo.

SIDOARJO, BN – Bupati Sidoarjo H. Subandi menjelaskan dalam rapat paripurna DPRD kabupaten Sidoarjo, Perubahan APBD di fokuskan pada peningkatan Anggaran Sektor Perioritas.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo telah mencapai kesepakatan terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Hal ini ditandai dengan disahkannya Raperda Perubahan APBD dalam rapat paripurna pada Jumat (2/8/2024) di ruang rapat sidang paripurna DPRD Kab. Sidoarjo.

Perubahan APBD ini difokuskan pada peningkatan anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, harapannya masyarakat Sidoarjo memiliki kualitas kesejahteraan hidup yang baik. "Perubahan APBD ini merupakan langkah strategis untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Kami berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo," ucap Plt Bupati Sidoarjo, Subandi.

Sementara itu, Ketua DPRD Kab. Sidoarjo, H. Usman menambahkan, bahwa DPRD Kab. Sidoarjo dapat memaksimalkan kinerjanya dalam membangun dan melaksanakan program-program prioritas yang sudah disusun dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sidoarjo tahun 2021-2026. "DPRD Sidoarjo mendukung penuh perubahan APBD ini. Kami berharap perubahan ini dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kab. Sidoarjo dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Sidoarjo," ujar Abah Usman. (yah)

Prosesi Pisowanan Agung Puncak Peringatan Hari Jadi Ke-700 Blitar



Bupati Hj. Rini Syarifah memberikan potongan tumpeng kepada Ketua DPRD Kab. Blitar Suwito Saren Satoto. (sastro)



Foto Para Bupati diarak menuju acara Pisowanan Agung di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.

BLITAR, BN - Peringatan Hari Jadi Ke-700 Blitar mencapai puncaknya, Momen ini ditandai dengan prosesi Pisowanan Agung. Acara yang digelar di Pendopo Agung Ronggo Hadi Negoro ini dimaknai sangat dalam oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Blitar. Tampak hadir jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Blitar, jajaran pemerintah desa dan kecamatan se-Kabupaten Blitar, dan sejumlah pejabat terkait di acara kemarin.

Hj. Rini Syarifah yang dipanggil akrab Mak Rini selaku Bupati Blitar menyampaikan pendapatnya tentang Pisowanan Agung "Masuk diusia 700 tahun, Blitar berdiri atau 7 abad tepatnya Kabupaten Blitar dengan julukan Land Of Kings (Tanah Para Raja), perkembangan cukup luar biasa juga banyak prestasi sudah diraih dari berbagai sektor. Dan hasilnya, berkat ridho Allah SWT, ikhtiar, kerja keras dan dukungan seluruh elemen masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada Tahun

2023 telah mencapai 4,45%," ujar Mak Rini panggilan akrabnya.

Disamping Pembangunan selama 3 tahun terakhir "Masuk diusia 700 tahun, ruas jalan yang telah dilakukan pengerjaan sepanjang 112.964,06 meter, drainase sepanjang 294.601,56 meter, jembatan sebanyak 38 unit dan perbaikan URC sebanyak 288 titik juga dilaksanakan oleh Mak Rini.

Sedangkan Program sertifikat tanah yang telah berjalan sampai saat ini sebanyak 150.698 sertifikat dan 4.566 sedang berproses.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional yang sedang berjalan yaitu JLS sudah melampaui target berjalan sebanyak 62%. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Gedung 8 Lt RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Proses pembangunan fasilitas jalan.

Acara puncak Pisowanan Agung berupa pemotongan tumpeng ulang tahun oleh Bupati Rini. Tumpeng kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto. (Sastro/Adv)

Polresta Banyuwangi Hadiri Pengukuhan dan Rapat Kerja MUI



Pengukuhan dan Rapat Kerja MUI yang dihadiri Kabagren Polresta Banyuwangi, Kompol Sudarsono, S.H. (dj)

BANYUWANGI, BN - Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nanang Haryono, S.H., S.I.K., M.Si yang diwakili oleh Kabagren Polresta Banyuwangi, Kompol Sudarsono, S.H., menghadiri acara Pengukuhan dan Rapat Kerja Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuwangi.

Rabu (07/8/2024). Acara yang berlangsung di Pendopo Shaba Swagata Blambangan ini, bertujuan untuk mengukuhkan kepengurusan MUI periode 2024-2029 dan membahas program kerja ke depan.

Acara dimulai pukul 10.30 WIB dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan tokoh agama. Di antaranya Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, KH Muh Hasan Mutawakkil Alallah, serta para kyai, tokoh ormas Islam, dan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan diawali dengan sambutan anak yatim, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Prosesi pengukuhan dimulai dengan pembacaan SK oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur dan dilanjutkan dengan penandatanganan sumpah jabatan serta pemberian ucapan selamat kepada pengurus baru.

Dalam sambutannya, Ketua MUI Kabupaten Banyuwangi, KH Asmuni Muhaimin Lc, menyampaikan harapan MUI dapat berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan mengakomodir keragaman yang ada di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi, Ibu Ipuk Fiestiandani, juga memberikan arahan agar MUI turut menjaga moralitas masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak negatif media sosial dan bahaya narkoba.

Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, KH Muh Hasan Mutawakkil Alallah, menekankan pentingnya peran MUI sebagai penengah dalam meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang serta menjaga harmonisasi antara ulama dan pemerintah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas keamanan nasional menjelang Pilkada 2024. Acara diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan penuh khidmat. (Dj/Srpt/Humas)



TU Puskesmas Tegal Siwalan Nur Azizah Kdh, A.Md.Keb bersama Kepala Puskesmas Dr. Lila saat menjelaskan permasalahan dengan OB kepada wartawan.

TU Puskesmas Tegal Siwalan Probolinggo Diduga Intimidasi dan Pecat Karyawan OB Seenaknya

PROBOLINGGO, BN - Puskesmas suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Sudah jelas sekali peran Puskesmas menyatu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, santun, sapa, dan profesional.

Beda dengan salah satu Puskesmas Tegal Siwalan Kec. Tegal Siwalan, Kab. Probolinggo, seorang oknum TU (Tata Usaha) Nur Azizah (Nia) sangat berani sekali diduga menyalahgunakan wewenang dan mengintimidasi karyawan OB (Office Boy) yang bernama Saiful Chak dan Zainal Abidin, yang sudah lama sekali bekerja di Puskesmas tersebut. Bahkan

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Diskominfo Pamekasan Gelar Desk Arsitektur SPBE

PAMEKASAN, BN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan menggelar Desk Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengisian LKE SPBE di ruang Wahan Bina Praja sekretariat daerah pamekasan yang dimulai pada tanggal 7-8 Agustus 2024.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Kegiatan Desk Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengisian LKE SPBE di ruang Wahan Bina Praja, Sekda Pamekasan 7-8 Agustus 2024.

Harga Cabai Semakin Pedas, Pj. Bupati Jombang Teguh Narotama Carikan Solusi



Gambar Cabe. (ist)

Saat ini Pemerintah daerah kabupaten jombang, bersama Pj. Bupati Teguh Narotama sangat semangat mencari solusi, utamanya dengan melakukan kerja terpadu antar OPD dalam mengatasi kasus ini dan harga komoditi pokok yang lain.

Sebenarnya d kecamatan Plandaan dan sekitarnya banyak petani tembakau, dan hasil panennya bagus. Namun pertanyaannya adalah kenapa di kabupaten jombang masih mahal?

Bahkan idealnya dengan jumlah panen cabe rawit di daerah plandaan mampu mencukupi kebutuhan cabe dengan harga standart. Petani juga tidak rugi, ini yang perlu kita benahi bersama di pedagang besar ataupun melarang tengkulak- tengkulak luar daerah membeli cabe di petani-petani yang ada di Jombang. (Tok)

KSOP Kelas III Tanjungwangi Gelar Aneka Lomba Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79



Lomba HUT Kemerdekaan RI ke-79 yang digelar KSOP Kelas III Tanjungwangi. (dj)

BANYUWANGI, BN - KSOP Kelas III Tanjungwangi menggelar Aneka Lomba Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-79. Hal ini disampaikan Kepala (KSOP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjungwangi Syamsurizal, S.Kom, M.Sc kepada bidiknasional.com, Rabu (7/8/2024).

"Selamat pagi, terimakasih, momen HUT Kemerdekaan RI ke-79, tanggal 17 Agustus 2024, kami menggelar berbagai macam perlombaan di mulai akhir bulan Juli kemarin, antara lain lomba tenis meja, lomba catur, lomba bulu tangkis dan perlombaan lainnya," tutur Syamsurizal.

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka memupuk solidaritas rasa kebersamaan. "Untuk ibu-ibu Dharma Wanita juga ikut di perlombaan, tetap kita tanamkan jaga kerukunan dan jaga Persatuan," terangnya.

"Momen HUT Kemerdekaan RI ke-79, tanggal 17 Agustus 2024 ini, kita juga mengenang jasa perjuangan pahlawan bangsa yaitu Yos Sudarso sebagai pahlawan Nasional dari Angkatan laut yang gugur di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran di laut Aru, Maluku dalam melawan Belanda, kita tanamkan semangat jiwa Nasionalisme dengan tetap melayani masyarakat, dan penumpang di Terminal Tanjungwangi," ucap Syamsurizal.

Untuk itu, dirinya menegaskan, petugas KSOP siap melayani kenyamanan, keselamatan bagi penumpang, serta memberikan himbauan penumpang kapal guna ikut menjaga ketertiban, kenyamanan, keselamatan diri dan keselamatan orang lain.

KSOP kelas III Tanjungwangi tetap menjalin sinergitas, komunikasi, koordinasi dengan Satpolairud Polresta Banyuwangi, Polsek KP. Tanjungwangi, TNI AL Lanal Banyuwangi, Pelindo III Tanjungwangi, ASDP Indonesia Ferry Ketapang, BMKG, BPTD, BPBD, BASARNAS dan Instansi terkait dalam hal keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlayar di laut. (Dj)



Mengucapkan

Selamat HUT Kemerdekaan RI Ke 79

(17 Agustus 1945- 17 Agustus 2024)
"Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Keluarga Besar
**PDAM Tirta Dharma Purabaya
KABUPATEN MADIUN**
Sumariyono, SE.
Dirut

Keluarga Besar
**SMK Negeri 2 Jiwon
KABUPATEN MADIUN**
Budi Setiawan, S.Pd, M.Si.
Kepala Sekolah

Keluarga Besar
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KOTA MADIUN**
Thariq Megah
Dirut

Keluarga Besar
**SMK Negeri 1 Wonoasri
KABUPATEN MADIUN**
Dra. Wiwik Wiyati M.pd.
Kepala Sekolah

Pj. Gubernur Jawa Tengah Lantik M Arief Irwanto Sebagai Penjabat Bupati Cilacap



Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Drs M Arief Irwanto M.Si sebagai Penjabat (Pj) Bupati Cilacap menggantikan Awaluddin Muuri (AM) di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang (10/8/2024). (ist)

SEMARANG, BN - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah, Drs M Arief Irwanto M.Si menjadi Penjabat (Pj) Bupati Cilacap menggantikan Awaluddin Muuri (AM).

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kantor Gu-

bernuran Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Pj.Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan bahwa dalam memimpin daerah, kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Sebab, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan di wilayahnya. "Saya minta terus melaku-

kan inovasi guna mewujudkan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat," kata dia.

Nana juga berpesan kepada Pj Bupati yang baru agar melakukan antisipasi dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan mitigasi sejak dini untuk mengantisipasi adanya potensi bencana. "Jalin sinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati juga diminta untuk berkoordinasi dan bersinergi untuk menghadapi perhelatan Pilkada serentak 2024. "Supaya Pilkada lebih baik, partisipasi masyarakat tinggi, situasi kondusif, berjalan baik, jujur, dan lancar," kata Nana.

Adapun pergantian Pj Bupati Cilacap tersebut berdasarkan pengajuan pe-

ngunduran diri AM sebagai Pj. Bupati Cilacap karena dirinya akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

Maka pelantikan ini menjadi momen bagi Arief Irwanto melanjutkan kepemimpinan AM yang telah bertugas sebagai Pj. Bupati Cilacap, terhunting sejak 20 November 2023.

Terkait dengan persiapan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak yang akan dihelat pada 27 November 2024, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menegaskan dan berpesan agar ASN betul menjaga netralitas.

Sementara itu pejabat yang turut serta hadir pada pelantikan Pj. Bupati Cilacap Arief Irwanto tersebut yakni sejumlah 48 pejabat yang terdiri dari Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Bagian Setda, Camat dan Pimpinan BUMD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cilacap. (Rilis/Apiung/As)

Ormas OWL Pusat Gelar HUT Ke-3 Tahun

BATANG, BN - Dalam rangka memperingati HUT Ke-3, Organisasi Kemasyarakatan Obor Warisan Leluhur (Ormas OWL) Batang menggelar syukuran dan do'a bersama, yang dilaksanakan di Teras Pandawa Jl. Dr.Sutomo, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Sabtu sore.

Acada dimulai sekitar pukul jam 15.30 WIB (10/08/24). Turut hadir pada acara Syukuran Ketua Progib Kabupaten Batang, Ayub beserta anggota, Dikin Ketua DPD SWI (Sekber Wartawan Indonesia) Kabupaten Batang dan Jajarannya.

Ketua Umum OWL DPP, Moses Triyono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah hadir dalam acara HUT Ke-3 Ormas OWL serta mendukung eksistensi ormas yang dipimpinnya.



Acara HUT Ormas OWL Pusat ke 3 tahun di Teras Pandawa Jl. Dr.Sutomo, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. (dikin)

Ia mengatakan tujuan diadakan hut ini di wilayah Batang adalah sebagai bentuk karena dirinya terlahir dari orang asli Batang, rasa bangganya memeriahkan hari lahirnya OWL Batang yang ke-3 ini bertambahnya saling guyub rukun antar anggota tergabung. "Tujuan di adakan acara ini untuk mempererat silaturahmi antar sesama anggota," ungkap Moses Triyono selaku Ketua DPP OWL.

Dia berharap, supaya OWL lebih di kenang dan tambah maju serta bisa di jadikan pengharapan buat warga sekitar. Kegiatan seperti ini rencananya akan menjadi rutinitas setiap tahunnya agar menjadi ajang silaturahmi dan saling koordinasi program - program kedepan.

Acara diakhiri dengan makan bersama dan ramah tamah sesama pengurus, anggota serta rekan media yang turut hadir memenuhi undangan. (Dikin/Trul)

Duta Besar Republik Seychelles Nico Barito bersama Gubernur Provinsi Quirino Filipina Kunjungi Banyumas



BANYUMAS, BN - Kabupaten Banyumas kembali menjadi sorotan internasional dalam hal pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dua negara, Filipina dan Seychelles, mengunjungi Banyumas untuk mempelajari metode pengelolaan sampah yang telah terbukti berhasil di bawah kepemimpinan mantan Bupati Achmad Husein.

Duta Besar Republik Seychelles, Nico Barito, bersama Gubernur Provinsi Quirino Filipina, Dax Cua, dan anggota parlemen Filipina, melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas pengelolaan sampah terpadu di Banyumas, pada Sabtu (10/8/2024).

Mereka didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Widodo Sugiri dan

mantan Bupati Achmad Husein yang kini berperan sebagai konsultan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Nico Barito, dihadapan wartawan menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan kali kedua bagi Seychelles setelah sebelumnya pada tahun 2022.

"Saya melihat banyak kemajuan dalam pengelolaan sampah di Banyumas. Meskipun Pak Husein sudah tidak menjabat, kebijakan yang beliau tetapkan tetap dilanjutkan. Ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat," ujar Nico.

Nico mengungkapkan bahwa Republik Seychelles, yang memiliki jumlah pe-

duduk sekitar 120 ribu orang dan kunjungan wisata mencapai 600 ribu, menghadapi masalah serupa dengan Banyumas, yaitu pengelolaan sampah basah dan kering.

"Awalnya, Seychelles berniat mengadopsi teknologi pengolahan sampah berbasis Eropa, namun setelah melihat keberhasilan Banyumas, mereka tertarik untuk menerapkan sistem berbasis komunitas yang dinilai lebih efektif," katanya.

Sementara Gubernur Dax Cua dari Provinsi Quirino Filipina, bersama anggota Kongres Women Filipina, Mrs. Midy Cua, juga menyampaikan kekagumannya terhadap sistem pengelolaan sampah di Banyumas. (As/rilis)

Gerakan Pangan Murah, Meriahkan Jalan Sehat HUT Kemerdekaan RI ke-79 Kota Pekalongan

KOTA PEKALONGAN, BN - Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79 dan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) di alun-alun Kota Pekalongan bersamaan dengan pelaksanaan jalan sehat kemerdekaan, Minggu (11/8/2024).

Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid menjelaskan bahwa gerakan pangan murah ini merupakan sinergi antara Pemerintah Kota Pekalongan bersama Bank Indonesia serta Bulog.

"Alhamdulillah kami selalu dibantu Bank Indonesia, mudah-mudahan kolaborasi dan sinergitas BI bisa terus berjalan. Dukungan dari BI bukan saja gerakan pangan murah, namun juga ada fasilitas beasiswa untuk beberapa pelajar, semoga supporter ini menjadi lebih berkah dan semangat manfaat kota Pekalongan," ujarnya.



Gerakan pangan murah yang digelar Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) di alun-alun Kota Pekalongan. (ist)

Sementara itu, Kepala Dinperpa, Lili Sulistyawati menuturkan sejumlah komoditas yang disediakan dalam pasar murah ini antara lain 400 paket sembako dan sembako ecer, bawang merah, bawang putih, sayuran, buah, daging ayam, aneka olahan ikan, produk beberapa Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Kelompok Tani Wanita (KWT) serta lainnya.

"Alhamdulillah bersamaan dengan jalan sehat kemerdekaan Kota Pekalongan, kami bersama Bank Indonesia dan Bulog menggelar pangan murah, masyarakat sangat antusias. Beberapa komoditas kita sediakan disini, untuk paket sembako kita bandrol dengan harga 85 ribu rupiah berupa 5 kilogram beras, minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kilogram. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan dapat membantu masyarakat Kota Pekalongan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka," pungkasnya. (Dikin)

Kantor KPBS Pengelola Batik Grosir Setono Kota Pekalongan Didemo



Massa gabungan LSM dan Ormas saat demo di depan Kantor KPBS Pengelola Batik Grosir Setono Kota Pekalongan. Khaeruddin Achmad Ketua KPBS (Inzet). (dikin)

KOTA PEKALONGAN, BN - Dinilai tidak ada kejelasan terkait persoalan besaran uang sewa kios yang disepakati, puluhan massa dan ormas berunjuk rasa di depan Kantor Koperasi Pengusaha Batik Setono (KPBS) yang menjadi pengelola pasar grosir batik setempat.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa juga membentangkan sejumlah tulisan yang menyoal adanya dugaan jual beli kios bernilai ratusan juta rupiah, meminta Bapak Kapolres mengusut dugaan intimidasi wartawan Bidik Nasional. Para pendemo gabungan Ormas dari LSM Robinhood23, LSM Barak RI, Ormas Probojowo, LSM Perisai, Sekber IPJT dan LBH Adhyaksa, mereka menyampaikan aspirasi dari para pedagang yang merasa dirugikan oleh pihak KPBS Pekalongan. "Jadi ada dua persoalan yang sedang kami soroti di Pasar Grosir Setono, pertama terkait tarif sewa kios naik tiap tahun tanpa mempertimbangkan kondisi usaha yang sedang lesu. Contoh terakhir pedagang diminta membayar dari Rp 5 juta menjadi Rp 7 juta, padahal lokasi kios berada di dalam yang notabene lebih sepi daripada yang ada di depan," kata Direktur LBH Adhyaksa Didik Pramono, saat beraudensi, Senin 12 Agustus 2024.

Kemudian yang kedua terkait adanya dugaan praktik jual beli kios yang nilainya mencapai angka ratusan juta rupiah yang dilakukan oknum pengurus maupun anggota koperasi. Biasanya modusnya sangat senyap tidak banyak diketahui orang karena risikonya akan langsung dilelang bila ketahuan. Lalu ada lagi praktik pengalihan hak atau mengontrakan kios ke pihak lain dalam hal ini pedagang baru dengan nominal mencapai angka puluhan juta bergantung letak kios.

Dugaannya mereka ini ada yang berasal dari oknum pengurus dan anggota koperasi serta pemilik lama kios yang biasanya dari pedagang awal di Pasar Grosir Setono bahkan non pedagang. Kelompok ini menguasai banyak kios yang membayar kontribusi ke koperasi sebesar Rp 1,5 juta, Rp 5 juta, Rp 8 juta dan Rp 13 juta lalu dikontrakan lagi ke pedagang baru dengan besaran mulai dari belasan juta hingga puluhan juta tergantung lokasinya.

Jadi jangheran kalau diduga ada oknum pengurus maupun anggota koperasi yang mampu menguasai belasan kios termasuk pihak lain dari pemilik pertama yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya diri.

"Kami mendengar sendiri dari pengakuan Ketua KPBS saat beraudensi bahwa praktik tersebut dianggap legal dan sah, jadi mau disewakan berapapun silahkan saja. Itu pernyataan yang kami dengar," ungkap Didik kepada media.

Sementara itu Ketua KPBS Kota Pekalongan, Khaeruddin Achmad saat audensi membantah adanya praktik jual beli kios maupun menaikkan uang sewa kios ke pedagang di Pasar Grosir Setono. Ia memastikan semua pedagang yang mengontrakan kios tercatat dalam buku sehingga pihaknya mengetahui adanya perubahan nama penyewa.

Ia pun menjelaskan tarif sewa kios di Blok Sidomukti sebesar Rp 6.375.000 pertahun di mana lokasinya berada di tengah-tengah pasar dan jumlahnya ada 20 kios. Jadi sesuai perjanjian kontak yang disepakati pedagang sebesar itu ditambah pph 10 persen. "Pajaknya kami bayarkan tiap tahun tanpa pernah menaguhkannya sepeserpun tiap kali transaksi yang dilakukan. Itu boleh dicek," tantangnya. (Dikin)

Setubuhi Anak Tiri, AR Ditangkap Polisi



Tersangka AR.

CILACAP, BN - Seorang Ayah berinisial RA (66) di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah ditangkap Polisi. Ayah bejad tersebut diduga telah menyetubuhi anak tirinya sendiri sejak tahun 2019 lalu.

Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono melalui Kasi Humas Polresta Cilacap Ipda Galih Soecahyo mengungkapkan terduga pelaku melakukan aksi bejadnya sejak tahun 2019, saat korban masih berumur 13 tahun.

Ipda Galih mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada sang ibu. "Awalnya korban tidak berani bercerita tentang kejadian tersebut kepada siapapun, karena diancam dengan kata kata 'Jangan bilang bilang ini rahasia kita sampai Mati' oleh pelaku," ujar Galih melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 10 Agustus 2024.

Galih menjelaskan, saat bercerita dengan ibunya, korban mengatakan pelaku telah melakukan aksi bejadnya sejak 2019 hingga yang terakhir pada bulan Juli tahun 2024. Menurut keterangan korban, dirinya telah disetubuhi oleh ayah tirinya sebanyak kurang lebih 10 kali. (Humas Polresta Cilacap/As/Suyatno)

KPU Kota Pekalongan Sosialisasikan Syarat Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada 2024



Acara Sosialisasikan Syarat Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada 2024 oleh KPU Kota Pekalongan. (dikin)

KOTA PEKALONGAN, BN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan menyosialisasikan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 yang dijadwalkan digelar pada Rabu, 27 November 2024. Sosialisasi ini menyasar 4 unsur elemen masyarakat, yakni jajaran Forkopimda, media, partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Cafe Alam Teduh, Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan

Selatan, Selasa siang (6/8/2024).

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menjelaskan bahwa, dalam sosialisasi ini, KPU Kota Pekalongan memberikan informasi mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang memuat detail informasi tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dalam hal ini, ada dua syarat pencalonan dan syarat calonnya yang termuat dalam regulasi tersebut.

"Diantaranya syarat pencalonan minimal harus ada 7 kursi atau 20 persen, lalu 25 persen suara sah, yang termuat dalam regulasi tersebut," ujar Fajar.

Menurutnya, sosialisasi ini merupakan tahapan awal, dimana pendaftaran calon kepala daerah melalui partai politik dibuka pada 27-29 Agustus 2024. Sosialisasi ini melibatkan 4 unsur yang diundang yakni partai politik yang akan mengusung bakal calon kepala daerah, media, Forkopimda atau stakeholder terkait, dan organisasi kemasyarakatan.

"Sementara dalam kegiatan sosialisasi ini diisi dari pemateri yang memang sudah berkompeten yakni didatangkan dari Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Aisha yang berkesempatan menyampaikan materi sosialisasi terkait PKPU Nomor 8 Tahun 2024, point-point terkait dengan proses Pencalonan, mekanisme pencalonan, dan lain sebagainya," tandasnya. (Dikin)

Masih Rawan Peredaran Rokok Ilegal, Tim Gabungan Satpol PP Magetan dan Bea Cukai Gencar Lakukan Razia



Operasi Pasar Sukses Temukan Rokok legal

Jangan Biarkan Rokok Ilegal Beredar

Satpol PP Magetan ketika menunjukkan hasil Razia rokok ilegal di Kecamatan Ngariboyo, Karas dan Kecamatan Nguntoronadi. (Ashar)

MAGETAN, BN - Meminimalisir dan menghentikan adanya Peredaran Rokok Ilegal khususnya di Kabupaten Magetan, Dinas Satpol PP dan Damkar Bidang Penegakkan Perda (Gakda) terus semangat memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan ruginya mengkonsumsi Rokok Ilegal. Sebab rokok ilegal dari segi kesehatan tidak terkontrol kadar nikotinnya, dan jelas bagi pemerintah secara otomatis mengurangi pemasukan pajak dari rokok yang beredar.

Selain sosialisasi, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan terus melakukan sidak pasar untuk memperkecil dan menghentikan beredarnya rokok ilegal maka dari itu Satpol PP Magetan dengan Bea cukai Madiun, operasi terus digalakkan seperti halnya operasi rokok ilegal dengan sasaran warung dan toko, Selasa (30/7).

Operasi pasar Selasa (30/7) melibatkan pihak kepolisian dari Polres maupun Kejaksaan Negeri Magetan yang terbagi menjadi 3 tim dengan lokasi berbeda, yakni Kecamatan Ngariboyo, Karas dan Kecamatan Nguntoronadi.

Operasi yang berlangsung pagi hari tersebut membuahkan hasil dengan ditemukan ribuan batang rokok ilegal dalam bungkus di sebuah warung wilayah Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo.

Wajah gembira, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, Gunendar, mengatakan, operasi dilaksanakan pagi hari dan akhirnya pihaknya menemukan lokasi penjual rokok ilegal dimana warung atau toko tersebut tidak khusus menjual rokok legal saja, tetapi juga menjual minuman seperti kopi dan makanan.

"Kita temukan berdasarkan informasi sebelumnya dari masyarakat bahwa di tempat tersebut dicurigai mengedarkan ataupun menjual rokok ilegal dan tidak perlu lama-lama, tim pun bergerak untuk melakukan operasi," kata Gunendar

Lanjut Gunendar, setiap tim masuk ke para pemilik toko dan warung kopi dengan santun kepada pemilik dan apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya rokok ilegal, maka tim akan memberitahu kepemilik toko atau warung kopi untuk tidak menjual rokok ilegal kepada masyarakat konsumen rokok dan tidak juga mau menerima dari sales rokok ilegal untuk menjual dagangan karena dampaknya juga berimbas para pedagang yang menyediakan dan menjual rokok ilegal dengan sanksi berdasarkan perundang-undangan yang ada.

Erik sebagai Petugas Bea Cukai Madiun menyampaikan, total rokok ilegal yang berhasil ditemukan tersebut sejumlah 1.964 batang, 15 nama merek rokok dan 101 bungkus dengan berbagai merk. "Dari jumlah itu, kerugian negara mencapai sekitar Rp1.5 juta," terangnya.

Atas pelanggaran tersebut pihaknya tidak memberikan sanksi, tapi masih pembinaan dengan cara penjual tersebut harus membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Untuk diketahui, kategori rokok ilegal yaitu rokok tanpa pita cukai (rokok polos), rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu dan rokok dengan pita cukai salah peruntukan.

Pita cukai palsu adalah pita cukai yang di foto copy atau print dan atau juga di pita cukai tersebut tidak ada hologramnya. Dimana hologram itu bisa dilihat apa bila dengan menggunakan sinar Ultraviolet.

Sedangkan sanksi bagi pengedar dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (Adv/Ashar)

PPP Sadeng DIY Studi Tiru Produksi Perikanan Tangkap di PPP Bulu Tuban



Rombongan pegawai PPP Sadeng DIY saat Lakukan Studi Tiru Dalam Produksi Perikanan Tangkap di PPP Bulu Tuban. (dkp)

TUBAN, BN - Pengukuran Ikan Terukur (PIT) merupakan salah satu kebijakan prioritas Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono guna menjaga kelestarian sumberdaya ikan dengan tetap mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Artinya, PIT memiliki tujuan untuk mempertahankan ekologi dan menjaga biodiversity, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kesejahteraan nelayan.

Pelaksanaan Pengukuran Ikan Terukur (PIT) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor **Bersambung ke hal.11 kol.1**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024
79 TH NUSANTARA BARU
INDONESIA MAJU
Sekretariat DPRD: Jl.Jendral Sudirman No.262 Telp: (0285) 391146 Fax: (0285) 391760

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

MENGUCAPKAN

Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2024

Pj. Bupati Pamekasan



Plt Kadis Kominfo



Drs. Taufikurrahman, M.Si

Kepala Disperindag



Akh Basri Yulianto, SH.

Kadis DLH



Drs. Supriyanto, M.Si.

Kadis PMD



Imam Rifadi, SH.

Kadis PUPR



Amin Djabir, ST.

Kadis BKD



Sahrul Munir, M.Si.



Masrukin, S.Sos, M.Si.

Kepala BKPSDM



Drs. Saudi Rahman, M.Si.

Plt Kadis DKPP



Ir. Nolo Gardjito

Direktur RSUD SMART



Dr. R. Budi Santoso SP, MM.

Kepala Bapperida



Sigit Priyono, M.Si.

Kadinkes



Dr. Sjafiuddin

Kadiskop UKM dan Tenaga Kerja



Muttaqin, S.Sos.

Direktur PDAM



Syamsul Arifin

Dirgahayu REPUBLIK INDONESIA
NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU
Kades Pulo JASADI
Kades Candipuro SUWARI, S.H
Kades Sumberejo AKHJAB
Kades Guccialit SUTAM, S.Sos

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK

N A S I O N A L

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

Seluruh persiapan telah mencapai tahap akhir, tinggal menunggu hari pelaksanaannya.

Jelang Pelantikan DPRD Kabupaten Pasuruan

PASURUAN, BN - Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan terpilih hasil Pemilu Legislatif (Caleg) Tahun 2024, kurang sepekan lagi.

Acara pelantikan yang dijadwalkan di laksanakan pada Rabu, 21 Agustus 2024, mendatang itu digelar di ruang Rapat Paripurna Gedung

■ Bersambung ke hal.10 kol.5



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASURUAN

Mengucapkan

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 2024



NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU



H. MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

H. M. SUDIONO FAUZAN, S.AG.MM

ANDRI WAHYUDI, A.MD

RIAS YUDIKARI DRASTIKA, SH

WAKIL KETUA DPRD

KETUA DPRD

WAKIL KETUA DPRD

WAKIL KETUA DPRD

Galian C di Lereng Bukit Gunung Genting Belitung Timur Terancam Sanksi Hukum



Aktivitas Galian C di Lereng Bukit Gunung Genting Belitung Timur menggunakan alat berat. (Tamrin)

BELTIM, BN - Aktivitas galian c, penambangan batu koral di lereng bukit gunung genting Desa Simpang Pesak di duga tidak memiliki izin tambang. Pelaku usaha pemilik lahan Supriadi akrab di sapa Pred, saat ditemui mengatakan aktivitas saat ini memang sedang ngambil batu. Dia mengatakan awalnya mendapatkan lahan ini dibeli dari masyarakat untuk berkebun sawit.

Namun lahan terlihat banyak batu belum dapat di tanam sawit jadi idenya untuk memanfaatkan batu yang ada, luas lahan ada

sekitar 2.6 hektar dengan surat keterangan tanah (skt) dan ada sertifikasi juga, jelasnya, Sabtu (10/08/24).

Aktivitas galian itu menjadi sorotan karena telah menggunakan alat berat excavator, di lereng bukit gunung genting desa simpang pesak, hal tersebut di ketahui berdasarkan informasi masyarakat.

Saat ditemui Supriadi mengatakan, sudah berjalan selama 11 hari, galian pengambilan batu koral itu dan belum ada batu yang keluar terjual saat ini ujarnya. Dan juga untuk aktifitas ini Dia

sudah permissi ke pihak Desa, kontribusi yang akan di berikan ke desa sebesar Rp.15000/truk bila nanti ada batu yang terjual kontribusi ini di sepakati alasannya memakai jalan desa.

Kepala desa Simpang Pesak, Suryanto terkait aktifitas penambangan batu-koral di lereng bukit gunung genting itu yang menggunakan alat berat excavator menyebutkan pihak desa belum pernah mengeluarkan rekomendasi perizinan dari desa.

"Lahan itu dibeli dari masyarakat, karena ada banyak batu mereka beniat untuk mengambil batu itu, alasan untuk kebutuhan masyarakat disini, akan tetapi kalo batunya untuk kebutuhan diluar itu untuk kebutuhan proyek, harus ada izin juga," jelas suryanto saat di temui wartawan.

Suryanto menyebutkan desa tidak keberatan, namun bila mereka ingin mengolah secara besar, besaran penambangannya layaknya harus ada rekomendasi desa dan dinas pertambangan.

Suryanto menegaskan memang pihak desa belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin dari penambangan itu.

Perihal kontribusi, Suryanto mengakui memang pernah ada pembicaraan kontribusi kedesa dan itu dikatakannya karena sesuai dengan Perdes untuk PADDesanya itu memang ada, dan untuk itu desa sebesar Rp.15000/ritase, hal tersebut, baru sebatas pembicaraan dan belum ada mengeluarkan rekomendasi perizinan, untuk kontribusi itu karena mereka menggunakan jalan desa jelasnya dan bukan mengambil kontribusi dari penambangan.

Terkait perihal ini, tim investigasi media ini meminta agar pihak APH, memantau segala aktifitas penambangan batu koral itu karena di duga tidak memiliki izin penambangan agar tidak menimbulkan kerugian pendapatan pajak daerah secara berkelanjutan bila memang akan di kelola untuk memenuhi kebutuhan proyek kedepannya. (Tamrin/As)

Pemkab Pesisir Barat Akan Gelar Pekan Festival Nayuh Tahun 2024



Penjabat (Pj.) Sekda Pesisir Barat, Jhon Edward memimpin rapat persiapan pelaksanaan Pekan Festival Nayuh Tahun 2024.

PESISIR BARAT, BN - Penjabat Sekda Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Drs. Jon Edwar, M.Pd., memimpin rapat persiapan pelaksanaan Pekan Festival Nayuh di Bangkukat Tahun 2024, di ruang rapat Sekda Lantai 3 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin 12/8/2024.

Dalam rapat tersebut Pj. Sekda, Jon Edwar, didampingi Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DiskopUKMdag), Siswandi, S.Kom., M.H., dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Edwin Kastolani Burtha, S.H., M.P., serta diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepada peserta rapat Pj. Sekda, Jon Edwar menyampaikan bahwa Pemkab Pesibar akan kembali menggelar Pekan Fest Nayuh di Bangkukat dengan tema Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 bersama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Rencana kegiatan Pekan Fest kali ini akan digelar pada 21 Agustus mendatang," ujar Jon Edwar.

Dalam kegiatan itu selain fokus mengembangkan sektor UMKM yang ada di Pesibar, beberapa rangkaian agenda bakal ikut digelar dalam pelaksanaan Pekan Fest tersebut, mulai dari jalan sehat dan lomba masak ikan bebas kreasi. "Tentunya para peserta nantinya akan mendapat berbagai doorprize yang telah disiapkan panitia," kata Pj. Sekda.

Dalam kesempatan itu Jon Edwar meminta agar seluruh OPD segera melakukan berbagai persiapan teknis dengan koordinasi yang baik. "Kita berharap agar acara Pekan Fest kali ini bisa terlaksana meriah dan lancar. Maka dari itu, untuk mewujudkannya kita harus segera mengambil langkah cepat, dan jangan lupa koordinasi yang baik sangat diperlukan agar semua tahapan kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal," pinta Jon Edwar. (Taufik)

Kapolres Beltim Pimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral

MANGGAR, BN - Dalam rangka pengamanan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Belitung Timur (Belitim) tahun 2024, Kapolres Beltim AKBP Indra Feri Delimunthe memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Beltim, Kamis (8/8).

Hadir dalam rakor itu, Bupati Beltim yang diwakili Asisten I Sayono, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Rita Susanti, Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja, Pabung TNI AD Mayor Inf.

Joko Lelono, Danpos AU Beltim Letda Erwin, KPUD, Bawaslu, para camat, perwakilan pimpinan partai politik.

Kapolres Beltim Indra F Delimunthe mengatakan rakor ini dilaksanakan sebagai upaya pengamanan pemilihan kepala daerah sekaligus mengetahui sejauhmana kesiapan personil maupun sarana prasarana Polri dan unsur terkait sebelum diterjunkan ke lapangan.

"Saya menyampaikan sangat penting sinergi antar instansi dalam mengawal jalannya Pilkada 2024 agar berlangsung aman dan lancar. Tentunya kami sangat apresiasi sinergitas di Beltim, dimana seluruh elemen sangat mendukung terselenggaranya pilkada yang kondusif," kata



Kapolres Beltim AKBP Indra Feri Delimunthe memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Beltim, Kamis (8/8).

AKBP Indra F Delimunthe kepada Diskominfo SP Beltim.

Kapolres mengungkapkan melihat hasil analisa dan evaluasi pilpres yang lalu, serta potensi kerawanan yang mungkin akan terjadi diharapkan agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata.

"Pada pilpres dan legislatif yang lalu masih terdapat kekurangan dan kendala, seperti masih ditemukan surat suara tertukar, surat suara tercoblos, money

politik dan lainnya, Semoga tidak terjadi di wilayah Beltim," jelasnya.

Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja, Polres Beltim akan mengerahkan sebanyak 258 personel atau 2/3 kekuatan personel di Polres Beltim dalam mengamankan setiap tahapan pilkada tahun 2024.

Disisi lain, Sayono selaku Asisten I Pemkab Beltim mengatakan kelancaran pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati Beltim dan Wabup adalah tanggung jawab bersama, sehingga perlu mendapat perhatian khusus seluruh elemen, semua pihak dan segenap lapisan masyarakat. (Tamrin)

Tim Konsultan Kemenhub RI Kunjungi Pelabuhan ASDP Manggar



Tim Konsultan Kemenhub RI saat mengunjungi Pelabuhan ASDP Manggar. (Foto: Ist)

MANGGAR, BN - Pihak konsultan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI mengunjungi Pelabuhan ASDP Manggar dan Pantai Menara Manggar untuk melakukan survey guna mengaktifkan kembali Pelabuhan ASDP Manggar,

Kabupaten Belitung Timur (Belitim). Iktu mendampingi kegiatan lapangan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Beltim Amirudin dan unsur terkait, Kamis (8/8).

Kepala Dinas Perhubungan Beltim Amirudin mengatakan pengembangan pelabuhan ASDP Manggar

menjadi prioritas mengingat perkembangan Beltim akan menjadi pintu gerbang ekonomi.

"Salah satu prioritas kita adalah aktifnya kembali Pelabuhan ASDP Manggar. Kita tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan agar jadi prioritas," kata Amirudin. Adapun langkah-langkah yang diupayakan yakni survei oleh Kementerian Perhubungan RI, menyiapkan berkas dokumen dan lainnya.

"Langkahnya adalah survei, melengkapi dokumen dan sebagainya. Semoga semuanya berjalan lancar," kata Amirudin.

Sementara itu, Ketua Tim

Konsultan Kemenhub RI, Kani Mahardika mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan survei terkait mengoptimalkan pelabuhan penyeberangan Manggar. Setelah itu melakukan kajian berdasarkan data yang didapatkan terhadap pelabuhan penyeberangan Manggar tersebut.

"Salah satu lokasi yang memiliki potensi di Provinsi Babel yakni Pelabuhan Manggar. Untuk mengoptimalkan kembali, ada beberapa opsi yang akan ditindaklanjuti yakni survei awal. Lalu akan keluar rekomendasi serta kajian-kajian mendalam untuk mengoptimalkan pelabuhan," kata Kani.

(Tamrin/As)

Sambut HUT RI ke-79, Camat Simpang Renggang Lepas Lomba Gerak Jalan Tingkat Kecamatan



Gerak jalan tepat waktu dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di depan kantor Camat Simpang Renggang, Jumat (9/8). (ist)

MANGGAR, BN - Camat Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur (Belitim) Adi Yusman melepas peserta lomba gerak jalan tepat waktu dalam rangka menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 di depan kantor Camat Simpang Renggang, Jumat (9/8).

Panitia peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 Kecamatan Simpang Renggang menyelenggarakan lomba gerak jalan tepat waktu

tingkat SD/SMP/SMA/SMK/Umum ini, dengan diikuti sebanyak 68 regu. Camat Simpang Renggang Adi Yusman mengatakan kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi dan memperkuat semangat nasionalisme pelajar dan masyarakat di Kecamatan Simpang Renggang. "Dengan mengikuti gerak jalan ini, diharapkan menjadi ajang untuk silaturahmi dan semangat nasionalisme," kata Camat Adi.

Ia juga menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi semangat masyarakat Simpang Renggang dalam menyemarakkan HUT RI ke 79. "Terimakasih atas antusias seluruh komponen masyarakat dan peserta dalam menggelorakan nuansa kemerdekaan RI sehingga lomba berjalan meriah dan ramai," ujar Adi.

Kegiatan ini, kata Adi, mengingkatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh dengan mengajak pelajar semua untuk membiasakan pola hidup sehat. "Kami ingin mengajak pelajar semua dan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh agar selalu sehat," ajak Camat Adi kepada Diskominfo SP. (diskominfo/s)

Bupati Asahan Sampaikan Pendapat Akhir di Paripurna DPRD

ASAHAN, BN - Bupati Asahan H. Surya, BSc mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Asahan di Aula Rambate Rata Raya Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Selasa (06/08/2024). Rapat paripurna ini beragendakan penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Asahan dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025. Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Besteng Panjaitan, SH, M.Si dan dihadiri Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, Anggota DPRD Kabupaten Asahan, OPD dan tamu undangan lainnya.

Pada sambutannya Bupati Asahan mengatakan, melalui persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, kami menyadari besarnya dukungan Dewan yang terhormat kepada Pemerintah Kabupaten Asahan. "Kami juga mengapresiasi pendapat Dewan yang terhormat yang telah memberikan rekomendasi, pandangan umum, saran dan solusi atas rencana kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam materi Ranperda APBD Kab Asahan Tahun Anggaran 2025 agar lebih optimal serta tepat sasaran", ungkap Surya.

Selanjutnya Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk proses evaluasi dalam rangka menyelaraskan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional serta untuk meneliti apakah Rancangan Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi rujukan bagi kita dalam penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2025. (TP)



Bupati Asahan H. Surya, BSc. (TP)

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Hidupkan Taman UMKM Bangkal



Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsjudo saat di Taman UMKM Bangkal. (ist)

SUMENEP, BN- Para Pelaku UMKM di Pasar Bangkal ucapkan terima kasih kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsjudo karena telah menghidupkan Taman UMKM Bangkal hingga jadi pusat pembelanjaan, kuliner, hiburan dan permainan di kabupaten Sumenep. Panggung hiburan Pujasera Bangkal yang digelar pada hari

Sabtu (10/8/2024) malam hari di Taman UMKM Bangkal diakui sangat membantu geliat peningkatan ekonomi masyarakat karena mampu menarik kehadiran pengunjung.

Dukungan Bupati Sumenep dibuktikan dengan diundangnya group musik Tongtong Arya Madhure untuk menghibur masyarakat di

Pujasera Bangkal Sumenep. Selain penampilan group musik Tongtong Arya Madhure, Pujasera Bangkal juga dihinggahi sanggar tari Putri Arya. Pantauan wartawan, ratusan masyarakat tumpah ruah memadati acara yang dipusatkan di Pujasera Bangkal tersebut. Tampilan Pujasera

Bangkal pun terlihat semakin menarik karena terdapat pernak pernik lampu hias.

Sinta (40), pedagang nasi goreng di areal Pujasera Pasar Bangkal bersyukur dengan adanya kegiatan tersebut. Hiburan kesenian dan kebudayaan yang ditampilkan berefek terhadap pelaku UMKM

di Pujasera Bangkal. "Acara ini tentu berdampak positif kepada pelaku UMKM di Pujasera Bangkal ini," kata Sinta. Informasinya panggung hiburan di Pasar Bangkal dijadwalkan akan dilakukan setiap malam dalam rangka menarik pengunjung.

(yus)

Rapat Paripurna DPRD dan Pemkab Setujui LPJ APBD Kabupaten Bogor 2023

BOGOR, BN - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu melakukan Rapat Paripurna dengan DPRD Kabupaten Bogor, dalam rangka persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024, penyampaian dokumen rencana KUA PPAS Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (2/8/2024).

Menurut Asmawa Tosepu, tahap demi tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah dilaksanakan, mulai dari Rapat Paripurna, penyampaian Raperda pada 21 Juni 2024, eks-pose pada 24 Juni 2024 dan pembahasan yang dilaksa-



Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu, saat rapat paripurna di Gedung DPRD. (ist)

nakan dari 24 Juni 2024 hingga 1 Juli 2024.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya badan anggaran yang selama rapat pembahasan telah banyak membe-

rikan saran, kritik dan masukan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun

2023," ujar Asmawa Tosepu.

"Sehingga Raperda ini dapat disetujui dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Tidak hanya itu hari ini juga kita dapat melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2024," ungkap Pj Bupati Bogor.

Lanjut Asmawa, perlu diketahui berkaitan dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Ranca-

ngan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025, tema pembangunan Pemkab Bogor tahun 2025 adalah optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat tiga prioritas pembangunan yakni stabilisasi ekonomi daerah, peningkatan tata kelola pelayanan publik, kinerja aparatur dan penataan administrasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah.

Asmawa Tosepu menjelaskan, berdasarkan RKPD Kabupaten Bogor tahun 2025 arah kebijakan belanja daerah adalah belanja kebutuhan pelayanan publik yang terdiri dari Penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah yang berkualitas, upaya peningkatan daya saing daerah, upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

(eml)

Pj Gubernur Lampung Lantik Ferli Yuledi Sebagai Pj Bupati Tulang Bawang



Pj Bupati Tulang Bawang, Ferli Yuledi resmi saat dilantik langsung oleh Pj Gubernur Lampung, Samsudin.

TUBA, BN - Pejabat (Pj) Bupati Tulang Bawang, Ferli Yuledi resmi dilantik langsung oleh Pj Gubernur Lampung, Samsudin menggantikan Qudrotul Ikhwani. Diketahui sebelumnya Ferli Yuledi, menjabat sebagai Sekda Kabupaten Tulang Bawang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang, Provinsi Lampung, atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri no 100.2.1.3326 tahun 2024

tanggal 8 Agustus tahun 2024.

Selain dari itu, Pj Gubernur Lampung juga melantik Pj Ketua TP PKK dan Dekranasda Kabupaten Tulang Bawang, di Balai Keraton Lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (10/8/2024).

Pelantikan ini dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, bahwa Penjabat Bupati atau Walikota diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah.

Diketahui, jabatan Qudrotul Ikhwani, selaku Penjabat Bupati Tulang Bawang akan berakhir pada 18 Desember 2024 mendatang. Namun yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Bupati. Maka pengisian kekosongan jabatan Pj Bupati Tulang Bawang perlu dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap hal demikian. (*dra)

Wabup Pakpak Bharat Sampaikan Pidato Sidang Paripurna P-APBD Tahun 2024



Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, saat sidang paripurna.

PAKPAK BHARAT, BN- Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Pakpak Bharat, menyebabkan sulitnya memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan di Kabupaten ini. Hal ini dijelaskan oleh Bupati dalam Pidato Nota Pengantar Perubahan APBD Pakpak Bharat Tahun 2024 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin,

Dr. M.Pd hari ini (07/08/2024) dalam Sidang Paripurna DPRD Pakpak Bharat.

Kita menyadari bahwa jumlah anggaran yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat. Namun kami meyakini apabila semua itu dialokasikan pada sasaran yang tepat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai aturan yang berlaku, niscaya masyarakat akan dapat merasakan hasil-hasil pembangunan yang kita laksanakan, jelas Bupati dalam Pidato Nota Pengantar tertulisnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pakpak Bharat melaksanakan Sidang Paripurna hari ini, dengan dua agenda penting yakni penanda tanganan Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2025, dan Penyampaian Nota Pengantar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kita berharap agenda Sidang pembahasan ini berjalan lancar sampai pada pengesahan nantinya, demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat yang tentunya akan bermuara pada kemajuan masyarakat kita sendiri, ucap H Mutsyuhito Solin usai mengikuti Sidang Paripurna hari ini. (T.Tumanggor)

Pj Gubernur Lampung Resmikan 7 Kampung Pancasila

TUBABA, BN - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin meresmikan pencanangan 7 (tujuh) Kampung Pancasila dalam Kunjungan Kerja (Kunker)nya di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). Peresmian tersebut dipusatkan di Tiyuh/Desa Panaragan Jaya Utama (PJU), Kecamatan Tulangbawang Tengah (Tbt), pada Rabu (07/08/2024).

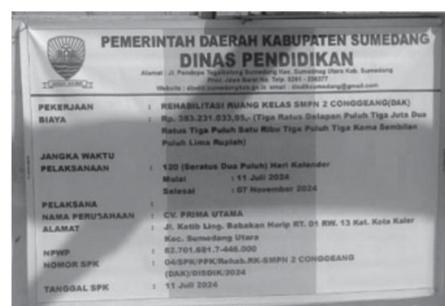


Pj Gubernur Lampung Dr. Drs. Samsudin saat meresmikan 7 Kampung Pancasila di Tubaba.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Samsudin mengucapkan selamat atas diresmikannya Tugu Kampung Pancasila yang akan menjadi simbol penting bagi kita semua di Kabupaten Tubaba. "Ini sungguh suatu kebanggaan bagi saya karena dapat kembali di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai dalam acara yang berbalut dengan rasa sukacita peresmian Tugu Pancasila," ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa peresmian ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Tubaba, tidak hanya sebagai monumen yang memperingati dasar negara kita Pancasila tetapi juga sebagai simbol semangat dan tekad kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. (*dra)

Rehab Ruang Sekolah SMPN 2 Conggeang dari Dana DAK Tahun 2024



SUMEDANG, BN - Pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan ruang Kepala Sekolah SMPN 2 Conggeang dianggarkan dari Dana DAK Tahun 2024. Pekerjaan ini dianggarkan untuk Ruang Kelas sebesar Rp.383.231.033.095,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah).

Saat ditemui awak media, Nurman Selaku Dir. Perusahaan CV. Prima Utama mengatakan bahwa benar pekerjaan ini dikerjakan oleh

CV.Prima Utama. "Namun pekerjaan di lapangan telah saya percayakan kepada Bp.Akbar," tandasnya.

Saat dikonfirmasi, Akbar selaku penanggung Jawab pekerjaan ini mengatakan, "mudah mudahan pekerjaan dapat dikerjakan tepat waktu dan insya Allah saya akan menjaga nama baik Perusahaan," ucapnya.

"Selain rehab ruang kelas kami juga mengerjakan rehab ruang Kepala Sekolah dan Ruang Guru tentang anggarannya kami mengikuti apa yang tercantum di Papan proyek," pungkasnya. (Ernawan)

Dana Desa Tri Dharma Wira Jaya untuk Bangun Kios Pasar Kampung

TUBA, BN - Pemerintah Kampung (Pemkap) Tri Dharma Wira Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang memanfaatkan dana desa untuk bangun Kios Pasar Kampung.

Kepala Kampung Tri Dharma Wira Jaya, Tatang Hermansyah, menjelaskan Pasar Kampung dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2024 sebesar Rp 217 juta untuk 3 kios sedangkan 4 kios tahun kemaren. Pembangunan pasar tersebut juga sebagai upaya Pemkap mempermudah akses jual beli bagi warganya.

"Pasar Kampung ini dibangun di revitalisasi, karena sebelumnya (aktivitas jual beli) masyarakat Kampung Tri Dharma Wira Jaya masih menggunakan bangunan swadaya masyarakat yang sudah mulai rusak dan lapuk dimakan usia dan tidak tertata dengan baik dan rapi," ungkap Tatang



Kios Pasar Kampung Tri Dharma Wira Jaya yang dibangun dari Dana Desa.

Hermansyah, Rabu 17 Juli 2024.

Sementara itu, Darman, (50) Pedagang Pasar, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kampung Tri Dharma Wira Jaya atas pembangunan / revitalisasi pasar kampung tersebut. Masyarakat berharap Pasar Kampung Tri Dharma Wira Jaya bisa menjadi sentra perdagangan dan perekonomian

warga, sekaligus mengembalikan fungsi jalan sebagai sarana berlalu lintas.

"Saya juga meminta warga untuk merawat kebersihan pasar, agar pasar ringgit makin berkembang," tegasnya.

Kepala Kampung Tri Dharma Wira Jaya juga mengimbau para pedagang mengikuti perkembangan teknologi, yakni berjualan secara daring (online) dengan memanfaatkan gawai yang dimiliki. (*dra)

Bupati Pakpak Bharat Tinjau Kemah Pramuka di Eko Wisata Hutan Kapur Desa Sibagindar

PAKPAK BHARAT, BN-Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor meninjau pelaksanaan Perkemahan Jumat Sabtu Minggu (PERJUSAMI) yang diselenggarakan oleh Kwartir Cabang Pramuka Pakpak Bharat di Kawasan eko wisata hutan kapur, desa Sibagindar, kecPagindar (03/08) Bersama ratusan anak pramuka dari berbagai Gugus Depan, Franc Bernhard Tumanggor seru-seruan mengikuti berbagai kegiatan pramuka yang dilaksanakan

di tempat ini. Dalam kesempatan ini, Franc Bernhard Tumanggor juga berkesempatan memanam pohon kapur di kawasan yang menjadi lokasi pelestarian pohon kapur ini.

Jadikan perkemahan ini sebagai wadah dan ajang untuk mengasah kreatifitas, keuletan dan gotong royong serta evaluasi dalam latihan kepramukaan di sekolah. Kita memilih tempat ini, dengan alasan yang kuat supaya adik-adik pramuka bisa sekaligus belajar dan



Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor saat meninjau perkemahan Pramuka.

mengenal apa itu pohon kapur yang telah melambungkan nama tanah Pakpak sejak ribuan tahun silam, ucap

Bupati dihadapan ratusan pramuka yang mengikuti perkemahan ini.

(T.Tumanggor)

Kelompok Tani Sukamandiri Desa Cimrutu Cilacap Terima Bantuan Jalan Usaha Tani

CILACAP, BN - Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memberikan bantuan kelompok Tani dalam bentuk program Jalan Usaha Tani (JUT).

Salah satu penerima bantuan tersebut, Kelompok Tani Sukamandiri Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap dengan ketua kelompok nya Warjuk.

"Alhamdulillah, mendapat bantuan tersebut dengan jumlah anggaran Rp 199.940.000,- untuk pembangunan prasarana jalan usaha tani panjang 428 lebar 2 meter," ungkap Warjuk.

Warjuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama dinas terkait dan PUPR kabupaten Cilacap yang telah merealisasikan kegiatan pembangunan prasarana jalan usaha tani.

"Mudah mudahan setelah dibangunnya jalan usaha tani ini bisa meningkatkan ketahanan pangan kabupaten Cilacap dan kedepan kami sangat berharap sekali ada



Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap (Asep Sujana)

perhatian terhadap saluran SIRLANG yang rusak. Karena lahan pesawahan kami saat ini cuma mengandalkan air tadah hujan. Kami merasa prihatin, petani yang ada di dusun Cimrutu belum bisa merasakan panen yang normal, dari tiga kali tanam cuma satu kali panen di lahan pertanian seluas 600 hektar," jelasnya.

Sementara, tokoh masyarakat Wahono asal desa Cimrutu mengatakan bahwa dalam pembangunan prasarana jalan usaha tani berjalan aman dan dikerjakan oleh masyarakat setempat. "Kearifan lokal

yang kami utamakan. Kami yang mengerjakan dan untuk kamilah manfaatnya. Terimakasih kepada Dinas Pertanian dan PUPR kabupaten Cilacap yang telah peduli kepada masyarakat. Ini memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan prodak pertanian Cimrutu walaupun saat ini lahan persawahan kami kekurangan air," pungkasnya. (Asep Sujana)

Bupati Jember Hendy Siswanto Dapat Surat Tugas dari PDIP untuk Pilkada 2024

□ Hendy : Jadi Kader Banteng Keinginan Saya Sejak Pilkada 2020

JEMBER, BN - Bupati Jember Hendy Siswanto mendapat tugas dari PDI Perjuangan untuk Pilkada 2024. Surat tersebut ditandatangani Ketua Prananda Prabowo dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Isi surat tugas tersebut meminta Hendy berkoordinasi dengan seluruh pengurus DPD Jawa Timur hingga rawat PDI Perjuangan Jember.

Selain itu, menyiapkan koalisi partai sebagai syarat pendaftaran ke KPU Jember. Hendy mengaku surat tugas dari PDI Perjuangan tersebut merupakan keinginannya sejak Pilkada 2020. Namun saat itu ia tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan.

"Pertama kali daftar ke PDIP, saya tidak mengerti politik, mentor saya dari awal Arif Wibowo (Ketua DPC PDIP)," kata dia, Senin (29/7/2024). Menurut dia,



Bupati Jember Hendy Siswanto saat menerima surat tugas dari PDI Perjuangan untuk Pilkada 2024.

surat tugas itu menjadi kebanggaan dirinya. Selain itu, semakin meyakinkan dirinya untuk meraih kemenangan periode kedua dalam Pilkada 2024.

Untuk itu, ia siap melaksanakan visi misi PDIP Jember yang tegak lurus untuk membantu warga kecil. "Kami siap dan patuh untuk melaksanakan perintah," ucap dia. Ia menambahkan siap menjadi anggota DPC PDI Perjuangan

yang dimilikinya sejalan dengan PDIP yakni untuk mengangkat nasib rakyat kecil.

"Kami sudah melakukan program kerakyatan selama tiga tahun ini," ucap dia. Program tersebut seperti peningkatan kesejahteraan dan status guru honorer dan GTT-PTT, layanan kesehatan gratis untuk warga miskin senilai Rp 523 miliar, beasiswa bagi warga miskin. "Termasuk penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem yang sudah habis di Jember," ucap dia. Bahkan di Jember sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Kini sudah meningkat menjadi desa maju dan mandiri. (sumber kompas.com/red)

HUT RI, Pemkab OKI Peduli Veteran, Yatim dan Lansia



Pj Sekda OKI, Muhammad Refly saat member bantuan ke Veteran, Yatim dan Lansia. (Nurlis)

OKI, BN - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) gelar anjaksanaan kegiatan sosial dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah yang bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak, anak yatim piatu dan lansia, Rabu (07/08/24).

Rangkaian anjaksanaan kegiatan sosial Kabupaten OKI dilaksanakan di tiga titik lokasi desa yang ada di Kecamatan Sirah Pulau Padang, meliputi kegiatan sunatan massal kepada 51 anak di Desa Terusan Menang, kemudian kegiatan pemberian bantuan kepada 50 anak-anak yatim piatu di Desa Mangun Jaya dan terakhir kegiatan pemberian bantuan kepada 83 lansia di Desa Ulak Jermun.

Pj Bupati OKI dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Pj Sekda OKI, Muhammad Refly menyampaikan bahwa kegiatan anjaksanaan sosial merupakan wujud nyata dari kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah serta mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan rasa kepedulian, kasih sayang dan kecintaan kami pemerintah kepada anak-anak, anak yatim piatu dan lansia," ujarnya. (Nurlis)

Kejari OKI Musnahkan Barang Bukti 117 Berkas Perkara



Kejari OKI Hendri disaksikan Pj Bupati Asmar Wijaya, memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (nurlis).

tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) periode Januari - Juli 2024 di Halaman Kantor Kejari OKI, Selasa (06/08/24).

Kajari OKI Hendri Hanafi, SH., MH, menjelaskan bahwa barang-barang bukti tersebut berasal dari berbagai macam tindak pidana umum yang berjumlah 117 berkas perkara, terdiri dari jenis barang bukti Narkotika, Senjata Api, Senjata Tajam, Pakaian, dll.

"Hari ini kita memusnahkan barang bukti 57 Berkas Perkara Narkotika terdiri dari sabu-sabu 70 bungkus paket kecil dengan berat total sebanyak 310 gram, Extacy sebanyak 52 butir (10 gram), Ganja sebanyak 40 gram. Kemudian barang bukti Senjata Api yang berasal dari 4 Berkas Perkara, dengan jumlah Senjata Api sebanyak 5 pucuk senjata api dan 9 butir amunisi aktif, anak peluru 4 butir dan 4 butir selongsong. Kemudian barang bukti Senjata Tajam berasal dari 9 berkas perkara dengan jumlah 14 Senjata Tajam jenis pisau garpu dan parang. Terakhir barang bukti Pakaian berasal dari 47 Berkas Perkara," Jelas Hendri.

Pemusnahannya dengan cara diblender dan dicampur air kemudian dibuang ke toilet untuk Barang Bukti Narkotika, dipotong dengan mesin gerinda untuk barang bukti Senjata Api dan Senjata Tajam, serta untuk Barang Bukti Pakaian, dll dimusnahkan dengan cara dibakar. (Nurlis)

Bupati Hendy Siswanto Antisipasi Lawan Kotak Kosong



Bupati Jember Hendy Siswanto.

JEMBER, BN - Petahana Bupati Jember, Hendy Siswanto, telah mengambil langkah antisipatif menghadapi kemungkinan terjadinya kotak kosong dalam Pilkada 2024. Kekhawatiran ini muncul seiring dengan dinamika politik lokal yang kian kompleks, serta keragaman masyarakat Jember yang membutuhkan representasi berimbang dalam proses demokrasi.

Menurut Hendy, Jember sebagai daerah dengan masyarakat yang beragam membutuhkan pola representasi yang mencerminkan keberagaman tersebut. "Keberagaman ini harus tercermin dalam pemilihan kepala daerah," kata Hendy,

Minggu (11/8/2024). Oleh karena itu, ia mendorong munculnya lebih banyak pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati (bacabup - bacawabup) untuk mewakili berbagai elemen masyarakat.

Saat ini, Hendy telah mengantongi surat tugas dari PDIP. Namun, dukungan dari partai-partai lain masih diperlukan untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. PDIP sendiri hanya memiliki 8 kursi di DPRD Jember, sehingga Hendy perlu mencari tambahan dukungan untuk memastikan dirinya dapat kembali berlaga dalam kontestasi politik yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Dalam upayanya, Hendy mendekati sejumlah partai lain, termasuk Golkar yang memiliki 6 kursi di DPRD Jember. Selain itu, ia juga berencana memberikan hibah berupa kantor kepada PDIP Jember, sebagai bagian dari strategi politiknya.

Langkah itu menurutnya, diharapkan dapat menjadi poin tawar dalam negosiasi politik yang sedang berlangsung. Hendy menegaskan komitmennya untuk memenuhi seluruh persyaratan pencalonan, termasuk menandatangani surat permohonan hibah kantor ke dewan dan melengkapi persyaratan administratif di Jakarta. "Minimal harus ada 10 kursi. Kami akan lengkapi agar syarat pendaftaran bisa terpenuhi," katanya.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, Hendy berharap potensi kotak kosong dalam Pilkada 2024 dapat dihindari, sekaligus memastikan demokrasi tetap tegak dalam proses pemilihan kepala daerah di Jember.

Di sisi lain sejumlah partai pemilik kursi di Parlemen daerah seperti Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PKS secara resmi telah merekomendasikan pasangan Muhammad Fawait dengan Djoko Susanto untuk maju di Pilkada Jember 2024. Praktis hanya tersisa PDIP, PPP, dan Golkar yang belum mengeluarkan surat rekomendasi pada calon bupati dan wakilnya. Ketiga partai itulah yang saat ini diupayakan oleh Bupati Hendy agar bisa merekom dirinya. (*red)

Rehab Masjid RSUD Jombang Mangkrak, Kemana Anggaran Rp 5 M?



Masjid RSUD Jombang yang rencana direhab, tapi gagal

JOMBANG, BN - Pada tahun 2022 Diduga ada persaingan kelompok oknum Pejabat di RSUD Jombang, manajemen lama pimpinan Direktur Puji Umbaran di geser keluar, manajemen baru terbentuk, sehingga rencana untuk rehab masjid RSUD Jombang semenjak tahun 2022 akhirnya gagal.

Entah karena apa tidak dilaksanakan padahal perencanaannya dan persiapan, sudah di lakukan tinggal pelaksanaannya, padahal waktu di rencanakan mengundang semua jajaran SKPD Jombang termasuk Bappeda, kini hanya tinggal cerita.

Kepala Bappeda Jombang ketika dikonfirmasi WA mengatakan, "Tanya ke RSUD Jombang" jawabannya melalui Whatsaap (WA) nya. Pihak RSUD Jombang melalui Wadir (Wakil Direktur) Mulya, ketika di konfirmasi, kenapa rencana rehab masjid dibatalkan, "Tidak ada," ujarnya kepada BN.

Sebenarnya pada rehab masjid tersebut sudah dianggarkan senilai Rp 5 Miliar,

dana dari BLUD RSUD Jombang. Menurut sumber terpercaya, "Bahwa rencana itu sudah fix, perencanaan sudah final, realisasi pun sudah dianggarkan dan siap di laksanakan. Ketika Dr. Puji di pindah, oleh manajemen yang baru tidak di laksanakan, entah dialihkan atau seperti apa kita tidak tahu. Artinya perencanaan yang sudah terealisasi bukan sebuah pelanggaran hukum, karena memang harus kita realisasi tahun tersebut dengan anggaran yang sudah masuk dalam DPA RSUD Jombang 2022. Jadi waktu itu bukan perencanaan abal- Abal," ujar salah satu sumber terpercaya.

Sementara itu juga akan konfirmasi ke Dr.Puji tapi sampai saat ini belum berhasil menemuinya. Menurut Jatmiko mantan pegawai RSUD Jombang yang kini sudah purna, melalui selulernya BN mengatakan, "Rehab masjid di RSUD Jombang tersebut memang benar rencana untuk pembangunan rehab masjid di RSUD Jombang.

Itu ide dari Dr. Puji Umbaran, karena beliau ini merasa prihatin melihat masjid di RSUD Jombang kurang maksimal menampung jamaah kadang membludak sampai keluar, sehingga beliau mempunyai pikiran untuk merehabnya, dan semuanya pun sudah matang. Malah rencana bangunan di majukan kedepan, dan di buat 3 lantai.

Itu di perkiraan selesai dalam 10 bulan, jadi perencanaannya waktu itu di akhir tahun 2021, Cuma waktu itu belum tayang di ULP, tapi sudah siap. Waktu itu di awal tahun2022, Bu Mundjidah malah minta pemaparan segala, jadi setelah pemaparan itu tiba-tiba Dr. Puji umbaran dipindah, jadi akhirnya tidak bias terealisasi, padahal lelang sudah siap waktuitu, tetapi belum tayang di ULP (Unit layanan pengadaan). (Tok/ Bersambung)

Khusairi Kabid Perencanaan RSUD Jombang.

DPRD Kabupaten Pasuruan ...

DPRD Kabupaten Pasuruan. Berbagai persiapan tandingan dilakukan dan terus dimatangkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dibawah kepemimpinan Drs. Moh. Ridwan, itu.

Terbaru, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi

dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkenaan dengan persyaratan administrasi, bersama stakeholder terkait untuk memastikan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2024-2025 terlaksana dengan sukses.

Dari pantau wartawan

Sambungan halaman 7

persiapan prosesi pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan periode 2024-2029 sudah mencapai 80 persen.

Persiapan itu diantaranya meliputi ketentuan administratif, standar protokol, serta fasilitas ruangan, hingga keamanan acara, dan pengaturan arus lalu lintas. (*)

Nasional Singkat

Kadispdik Pakpak Bharat Buka Pemusatan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera



PAKPAK BHARAT, BN- Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pakpak Bharat, Agusman Padang, ST, M.Si membuka Pemusatan Pelatihan

bagi Anggota Pasukan Pengibar bendera (Paskibra) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2024 di Balai Diklat BKPSDM Pakpak Bharat, desa Cikaok (06/08/2024). "Saya atas nama Bupati Pakpak Bharat, hari ini membuka dengan resmi pelaksanaan pemusatan pelatihan bagi adik-adik calon Paskibra Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2024 ini, semoga pelatihan ini membawa manfaat bagi adik-adik sekalian," ucap Agusman Padang. Agusman Padang berpesan, agar anak-anak calon Paskibra ini agar berlatih dengan sungguh-sungguh, sebagai pilihan terbaik yang telah mengikuti tahapan seleksi yang ketat beberapa waktulalu. (T.Tumangger)

Ratusan Pelajar di OKI Ramaikan Lomba Gerak Jalan dengan Kostum Unik



OKI, BN- Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 79 dan

diikuti oleh 124 Kelompok peserta dari tingkat SD sampai SMP se-Kabupaten OKI, Senin (12/8/2024). Pembukaan lomba gerak jalan Start di Dinas Sosial Sampai finish dilapangan Hatta Kayuagung Kabupaten OKI. Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan HUT RI dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta semangat nasionalisme di kalangan generasi tingkat SD dan SMP karena didalam perlombaan akan tersirat jiwa yang kompetitif baik antar regu dan maupun pribadi. Kata Bupati OKI melalui Asisten Bagian Pengembangan Ekonomi. H.M.Lubis, SKM, M.Kes. (Nurlis)

Taekwondo Pakpak Bharat Raih 4 Emas dan 11 Perak di Ajang Test event PON XIX 2024



P A K P A K BHARAT, BN- Kontingen Taekwondo Kabupaten Pakpak Bharat berhasil mengamankan 4 Medali Emas

dan 11 Medali Perak pada ajang Test Event PON XXI 2024 dan Kejurnas Taekwondo Open Menpora Cup di Gedung serba Guna Universitas Negeri Medan, Medan (01-04/08/2024). "Puji Tuhan, anak-anak mampu menunjukkan hasil yang gemilang, berhadapan dengan atlet-atlet terbaik dari lia Provinsi tentu bukan perkara mudah, skill dan mental bertarung harus benar-benar mereka kuasai," ucap Pelatih Taekwondo Pakpak Bharat, James Samosir. (T.Tumangger)

TU Puskesmas Tegal ...

kedua karyawan tersebut mempunyai SK Puskesmas dan SK Dinkes, sampai sekarang SK (surat keputusan) tersebut masih berlaku sampai 31 Desember 2024.

TU yang berlagak seperti kapus (Kepala Puskesmas) tanpa koordinasi dengan atasan bertindak sendiri seakan-akan Puskesmas tersebut miliknya. Kalau memang ada masalah dengan dua karyawan tersebut paling tidak dibina/kalau fatal paling tidak ada SP 1 s/d SP 3, bahkan lebih fatalnya dua OB (office boy) tersebut tidak mempunyai masalah, masih dalam tanggungjawab kontrak Puskesmas dan Dinkes (dinas kesehatan) Kab. Probolinggo, sudah diberhentikan dan diganti orang lain.

Dua OB (office boy) tersebut Saiful Chak dan Zainal Abidin, pada saat ditemui Bidik Nasional (BN) di kediamannya mengatakan, “Tuntutan kami ada dua : 1. Mulai terakhir bulan Desember 2023 s/d Agustus 2024, kami tidak digaji sama sekali, jangan bilang kami tidak mau bekerja kami punya dasar meminta gaji kami karena SK kami masih aktif pada waktu kami diberhentikan secara sepihak oleh TU (tata usaha) Nur Azizah (Nia). SK kami dikeluarkan oleh kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Probolinggo, bukan TU (tata usaha) Nur Azizah (Nia) yang mengeluarkan SK (surat keputusan) kami. 2. Kami masih berkeinginan untuk mengabdikan kepada pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Tegal Siwalan, untuk bisa kembali bekerja bukan diberhentikan sepihak tanpa ada kejelasan diam di rumah sampai saat ini. Kami pernah dipaksa untuk membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri, kami tetap tidak mau, jadi kami sampai saat ini tidak ada kejelasan status kami”, terang Saiful Chak dan Zainal Abidin.

Ketua paralegal yang berinisial SN, yang mendampingi

PPP Sadeng ...

11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Salah satu poin dalam aturan tersebut yaitu mengatur zonasi. Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat, Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Kamis 04 Juli 2024 melaksanakan kunjungan kerja/study tiru terkait dengan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Salah satunya kunjungan di

Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu, Kabupaten Tuban, untuk melihat sarana prasarana pendukung perikanan tangkap.

“Kedatangan kami disini bertujuan silaturahmi dan yang kedua belajar atau ngangsu kwaruh terkait sarana prasarana pendukung kegiatan PIT dan terkait retribusi kepelabuhanan,” kata Agus Santoso, selaku Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran.

Kalender 2024 ...

yang hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang mementingkan perutnya sendiri.

Menurut salah satu sumber yang terpercaya kepada BN mengatakan, awalnya ada salah seorang rekanan pernah WhatsApp (WA) kepada Sekwan DPRD Jombang Bambang Sriyadi, meminta supaya pengadaan kalender di dewan dia yang mengerjakannya, tetapi oleh Sekwan Bambang Sriyadi membalasnya melalui WA. “Perintah Ketua supaya diberikan oleh Pak And (salah satu anggota dewan),” ujar Sekwan melalui WA nya. Mungkin yang di maksud ketua oleh Sekwan adalah ketua dewan DPRD Jombang.

Sampai sekarang WA tersebut masih ada, untuk bukti. Sementara sampai saat ini Ketua DPRD Jombang belum berhasil dihubungi.

Sementara saat itu Sekwan dihubungi oleh BN untuk dikonfirmasi, tetapi selalu tidak di tempat dan sampai saat ini pun sulit untuk ditemui. Pernah sekali menghubungi BN untuk datang ke kantornya, ternyata BN sampai di kantor nya ternyata tidak ada di tempat. Hingga saat ini Sekwan selalu berbelit-belit jika mau di konfirmasi langsung.

Menurut laporan sumber yang diterima BN, bahwa sejak pengadaan kalender tahun 2022-2023 yang diduga dilakukan seorang anggota dewan yang di tunjuk sebagai pelaksana pengadaan (mencetak) kalender oleh Sekwan DPRD Jombang.

Pada pengadaan tahun 2022-2023 di pesan 5000 exemplar (pemesanan) isi kalender 12 lembar (halaman) dengan harga Rp 31.250, menggunakan kertas AP 190. Sedangkan kalender untuk tahun 2024 yang dianggarkan tahun 2023 isi halaman 6 lembar dengan harga Rp.20.500,- menggunakan kertas AP 150 dan dipesan 9750 exemplar, anggaran yang dikeluarkan Rp 199.875.000,-. Jika diambil kesimpulan kalender 2024 harganya lebih mahal, harusnya separuh dari harga pagu Rp 31.250,- (pengadaan kalender tahun 2022-2023).

Jadi harga pesan kalender tahun 2024, harganya seharusnya kurang lebih Rp 15.125,- per exemplar, apalagi dengan menggunakan kertas AP 150, kualitas kertas jauh beda dengan kualitas kertas AP 190 (kalender tahun 2022-2023). Apalagi pengadaan kalender tahun 2024 ini pesan 9.750 exemplar, harusnya harganya lebih turun dari harga tahun 2022-2023.

Sedangkan menurut harga pasaran umum di percetakan, kalender dengan ukuran seperti itu kurang lebih Rp 10.000,- per exemplar. Jadi perlu diketahui bahwa pada pengadaan kalender tahun 2022-2023-2024 dilakukan dengan sistem E-Katalog, tetapi diduga kuat sebelum masuk di ULP (Unit layanan pengadaan) sudah ada pengkondisian dengan rekanan yang ditunjuk.

Sementara menurut PPK pengadaan kalender di Gedung DPRD Jombang Dhian Retno Nugraheni, ketika dikonfirmasi BN terkait pengadaan kalender tahun 2024 mengatakan, “Harga itu sudah disesuaikan menurut LKPP 20.500 per eksmplar,” ujarnya.

Tetapi ketika ditanya CV siapa yang mengerjakannya, tidak pernah berani menyebutnya dan lagi ketika ditanya tentang RAB nya “sudah ada di e- katalog pak,” ujarnya. “Pak tolong jangan direkam, tolong pak, nanti biar Pak Sekwan aja,” pungkasnya.

Sedangkan menurut sumber yang di percaya, Pada perbandingan kalender tahun 2022- 2023, dianggarkan Rp.31.500- per exemplar, terdiri dari 12 halaman. Kertas AP 190. Jauh beda dengan kalender yang dipesan tahun 2024, perbandingan nya lebih mahal.

Pertanyaannya, benarkah pada pengadaan kalender

Sambungan halaman 4

masalah dan persoalan terkait dua OB (office boy) Saiful Chak dan Zainal Abidin, menjelaskan, pada BN apa yang dilakukan ASN (Aparatur Sipil Negara) TU Puskesmas Tegal Siwalan Nur Azizah (Nia) diduga melanggar pasal 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 (tentang menyalahgunakan wewenang sebagai TU bukan sebagai kepala Puskesmas dan kepala dinas kesehatan yang mengeluarkan SK).

“Melanggar Pasal 335 (mengancam memberhentikan) dan pasal 446 ayat (1) UU 1/2023 (barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang) diduga dilakukan ASN TU Puskesmas Tegal Siwalan melanggar hukum, bila tidak ada titik ketemu untuk menyelesaikan, layak dilaporkan ke ombudsman dan Aparat Penegak Hukum,” kata para legal itu.

ASN TU Puskesmas Tegal Siwalan Nur Azizah (Nia) pada hari Kamis 13.00 WIB Tanggal 1 Agustus 2024, mengakui perbuatannya di depan kepala Puskesmas Dr. Lila dan didepan dua wartawan yang sedang merekam pembicaraan tersebut pada waktu konfirmasi di ruangan kepala Puskesmas. “Saya sempat menggedor meja pada dua OB (office boy) dan mengintimidasi mereka. Saya juga bilang masuk dan keluarnya kamu bekerja disini apa kata saya”, aku Nur Azizah di ruangan kepala Puskesmas.

(ikuti ulasan BN edisi BN/Tim)

Sambungan halaman 6

Dalam sambutannya Plt.Kalabuh berterima kasih atas kunjungannya, selanjutnya dilanjutkan paparan Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan terkait data produksi yang didaratkan di dermaga. Pada kesempatan yang sama rombongan studi tiru Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng berjumlah 7 (tujuh) orang juga melakukan studi lapangan terkait sarana di dermaga, tempat pelelangan ikan, kolam

labuh dan melihat proses pemilihan/sortir ikan diatas kapal didampingi Plt.Kalabuh, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan.

Tim Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng berharap dari kunjungan ini bisa mengadopsi prosedur pengelolaan retribusi kepelabuhanan dan optimalisasi produksi perikanan tangkap.

(adv/dkp)

Sambungan halaman 3

tahun 2024 dengan jumlah sebesar 9750 dicetak dengan jumlah sebesar itu, kalau memang benar, dimana semua kalender tersebut dibagikan?

Sedangkan pada percetakan yang membuat kalender tahun 2024 juga meragukan domisilinya. BN sempat investigasi mencari keberadaan percetakan tersebut (ADP) yang menurut informasi beralamat di jalan Hayam Wuruk. Ternyata tidak ditemukan. Dugaan percetakan tersebut memang dirahasiakan, atau fiktif keberadaan nya.

Sama hal nya bahwa pada pengadaan kalender tahun 2024 ini ada sebuah persekongkolan untuk mengeruk uang negara hanya untuk kepentingan perut itu diduga dilakukan terutama oleh oknum- oknum yang terkait pengadaan barang dan jasa.

Menurut salah satu tokoh ulama yang meminta jangan disebutkan nama nya ketika dimintai pendapat oleh BN mengatakan, “Saya melihat gedung dewan itu sangat angker, istilah angker itu bukan karena banyak demit nya (setannya). Maksud saya angker karena disitu ada beberapa oknum yang doyan makan uang haram, seperti pada penggunaan barang dan jasa banyak dugaan di rekayasa dan lain lainnya, ada pepatah Jawa se pandai- pandai nya orang menyimpan bangkai, pasti ketahuan juga. Ya itu lah, dimana ada asap pasti ada api. Itu dugaan saya seperti itu,” ujarnya kepada BN.

Selain itu BN minta pendapat pada salah satu pejabat Pemkab Jombang dan mewanti wanti jangan disebutkan namanya mengatakan, “Siapa pun yang mengerjakannya tidak masalah, pbanding harganya aja buktikan. Nanti biar Inspektorat yang akan periksa atau APIP, nanti kalau memang ada kelebihan (Mark- up) saya suruh mengembalikan,” ujarnya.

Menurut salah salah satu tokoh masyarakat di Jombang ketika di minta pendapat BN, mengatakan, Komentar pejabat tersebut agak lucu, seperti nya dia membela bila di jajaran Pemkab Jombang ada yang menyalahgunakan wewenang yang diduga di tutupi kesalahannya.

“Sama halnya orang mencuri ketahuan di suruh mengembalikan, bagaimana jika orang kecil yang mencuri, pasti digebuki warga dan dibawa ke kantor polisi, tetapi pejabat yang beda penanganan nya, malah diamankan, memang hukum itu seperti nya tidak adil,” ujarnya.

Perlu diketahui, pada pengadaan kalender tahun 2024 diduga oknum dewan yang di tunjuk Sekwan adalah rekanan keponakan sendiri berinisial ‘Rnd’ ditunjuk sebagai pelaksana bayangan, tetapi oknum anggota dewan tersebut yang mengendalikan nya. dia yang mengerjakannya.

Sementara menurut And salah seorang oknum anggota dewan yang sempat dikonfirmasi BN mengatakan, “Saya hanya memberitahukan kepada Rdr (keponakan), kamu ke dewan ada pengadaan kalender, ya cuma gitu saja saya,” ujar And kepada BN. Komentar oknum anggota dewan tersebut ada indikasi berkelit menggunakan alasan yang masuk akal, tetapi itu mungkin bisa di cemat, bila itu hanya sebuah dagelan yang tidak lucu.

Pada waktu yang lain, salah satu rekanan yang berinisial Rnd sempat dikonfirmasi oleh BN, “Pak gak usah di beritakan, enggak enak sama om ku pak, nanti tak bilang om ku dulu,” ujarnya Ketika di temui BN. Setelah itu beberapa hari kemudian sulit dihubungi.

Pada pengadaan kalender di Gedung Dewan DPRD Jombang, Kabag umum Sekretariat Dhian Retno yang di tunjuk sebagai PPK pengadaan 76kalender diduga termasuk orang yang paling bertanggung jawab dan harus di 6 secara hukum oleh aparat. (tok)

Diskominfo ...

Sambungan hal 4

Menurut Plt Kepala Diskominfo Drs Taufikurrahman Msi menyampaikan kegiatan Desk Arsitektur SPBE itu bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi program dilingkungan pemerintah daerah Pamekasan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya dengan target akhir meningkatkan pelayanan publik. “Program ini memastikan semua kebijakan,standart dan regulasi yang terkait dengan SPBE diikuti oleh instansi di semua OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Pamekasan, sehingga menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Selain itu,dikatakannya pihaknya akan mengintegrasikan sistem melalui aplikasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat terhubung dengan baik, maka dengan demikian segala informasi tentang pelayanan pemerintahan berjalan efektif. “Semua OPD diharapkan dapat mendukung dan menyediakn data terkait SPBE tersebut,” pungkasnya. (noerkholis)

Pilbup Jember ...

Sambungan hal 1

“Hasilnya menunjukkan bahwa Hendy Siswanto berada di posisi tertinggi, yakni 36,6 persen. Kemudian, Muhammad Fawait 32,3 persen, Faida 20,4 persen, Gus Jaddin 8,2 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 2,5 persen,” sambungnya. ARCI juga mensurvei elektabilitas calon Bupati Jember tanpa memasukkan nama Hendy Siswanto. Hasilnya, Muhammad Fawait berada di posisi tertinggi, yakni 49,7 persen. Disusul Faida 25,5 persen dan Gus Jaddin 20,1 persen. “Jadi kalau Hendy tidak maju (calon bupati), maka elektabilitas Fawait yang tertinggi,” kata Baihaki.

Sedangkan untuk sosok bakal calon wakil bupati, nama Muhammad Balya Firjaun Barلمان atau Gus Firjaun masih berada di posisi tertinggi. Pria yang saat ini menjabat wakil Bupati Jember itu memperoleh elektabilitas sebesar 31,7 persen.

“Disusul Joko Susanto 12,3 persen, H. Karimullah 9,6 persen, Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Vian) 8,2 persen, Arismaya 7,1 persen, Arif Cahyono 5,6 persen, Kamiluddin 3,9 persen, tidak tahu dan tidak menjawab 21,6 persen,” tambah Baihaki.

Survei ini, lanjut Baihaki, menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling dengan melibatkan 1.000 responden. Dengan margin of error sekitar 3,5 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen. (dtc*)

Dinas PUPR ...

Merujuk pada sejumlah ketentuan (regulasi) terkait pelaksanaan purchasing e- katalog pemerintah, antara lain:

(1) Peraturan LKPP Nomer 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik
(2) Surat Edaran Kepala LKPP Nomer 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Purchasing Katalog Melalui Mini Kompetisi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pengadaan

(3) Surat Keputusan Kepala LKPP Nomer 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik: Khususnya pada Bab Pelaksanaan Purchasing Katalog Huruf (f) dan huruf (h), dimana ditegaskan bahwa aspek Negoisasi Harga dan Negoisasi Layanan Tehnis Pendukung wajib dicantumkan dan dicatatkan pada fitur negoisasi pada aplikasi katalog elektronik.

Saat itu BN, konfirmasi tentang sejumlah hal dalam rangka untuk memenuhi keseimbangan berita, antara lain bahwa berdasarkan tampilan layar katalog lokal di Dinas PUPR Ngunjuk tahun anggaran 2023, apakah seluruh paket purchasing Dinas PUPR sudah disertakan/dimunculkan dokumen negoisasi harga/ negoisasi layanan teknis pendukung.

Selain itu, apakah dokumen negoisasi sudah di jalankan dengan benar, bagaimana bisa meyakinkan, memastikan pelaksanaan purchasing katalog di Dinas PUPR Ngunjuk sudah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Sudah benarkah pada tampilan layar katalog.

Sementara ini BN, mendapatkan sumber terpercaya, bahwa beberapa paket purchasing Dinas PUPR Ngunjuk memunculkan nilai HPS dan Kontrak yang sama. “Kalau memang itu terjadi, hal ini memunculkan kesan bahwa pelaksanaan katalog tidak disertai proses negoisasi harga atau negoisasi layanan teknis pendukung,” kata sumber BN.

Selain itu, lanjut sumber BN, pada paket purchasing bertajuk Pengadaan Alat Besar (Pengadaan Vibro Roller), kode paket ABS-P2307-6555129, dengan nilai kontrak Rp 977.000.000, diduga tidak ada yang beres. Pertanyaannya, apakah pada pemenang paket muncul atau disebutkan. Menurut informasi yang di terima BN, bahwa pemenang paket di duga fiktif.

Sedangkan salah sumber BN mengatakan, “Apakah terkait negoisasi dilakukan hanya dilakukan hanya kepada satu penyedia saja, atau lebih dari satu. Sebab jika hanya dilakukan kepada satu penyedia,hal itu di pastikan menyalahi aturan dan terkesan kuat ada praktik main mata,” ujarnya kepada BN.

Selain itu pada paket epuchasing katalog bertajuk pemeliharaan berkala Ngankatan-Gondang kulon, dengan kode paket PO- P2311-7863316, senilai kontrak Rp 1.732.500.000,- apakah sudah berjalan sesuai mekanisme. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai mekanisme yang benar, terkait besaran volume pekerjaan dan pada dokumen back up volume yang dibuat apakah juga sudah benar, apakah tidak ada rekayasa.

Menurut informasi yang di terima BN, bahwa negoisasi dilakukan hanya kepada satu penyedia saja, atau lebih dari satu masih meragukan. Biasanya, mana yang di tunjuk yang sudah punya hubungan baik dengan pihak Dinas PUPR itu yang di nomor satukan. Sebab, jika hanya dilakukan kepada satu penyedia, hal itu dipastikan menyalahi aturan dan terkesan kuat ada praktik main mata.

Informasi yang di terima BN bahwa pada pemenang paket e- purchasing katalog bertajuk pengadaan material lokal untuk pembangunan jalan Bajang - Malangbong senilai kontrak Rp 1.633.130.000,- serta paket pengadaan konstruksi jalan di Desa Joho senilai kontrak Rp 1.803.080.000,- pada paket ini diduga pada pemenang kedua tidak disebut dan tidak muncul pada dokumen katalog, pada dokumen katalog di duga disembunyikan. Benarkah itu bisa terjadi di Dinas PUPR Ngunjuk ?

Selain itu pada paket purchasing katalog bertajuk Pengadaan Material Lokal Untuk Pembangunan Jalan Bajang- Malangbong senilai kontrak Rp 1.633.130.000, serta paket Pengadaan Rekonstruksi Jalan di Desa Joho senilai kontrak Rp 1.803.080.000, juga patut disoroti, pertanyaan kenapa nama pemenang kedua paket tidak disebut atau tidak muncul pada dokumen katalog?

Benarkah, bahwa pada pelaksanaan paket katalog Dinas PUPR Ngunjuk tahun anggaran 2023 diduga kuat ada praktik korupsi,dan terjadi kongkalikong ?

Sebelumnya BN konfirmasi langsung, sudah melalui surat dan diterima oleh pihak Dinas PUPR Ngunjuk, melalui balasan surat tersebut disebutkan, “Menindak lanjuti surat saudara Nomor 25/ Konfirm BN/ VI/ 2024/ 3 Juni 2024, perihal dugaan penyimpangan pada pengadaan Epuchasing Katalog Dinas PUPR Kabupaten Ngunjuk. Setelah kami mempelajari surat saudara dan menyandingkan UU. No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, dapat kami sampaikan bahwa persyaratan permintaan informasi yang saudara ajukan belum lengkap karena, :

1. Belum dilampiri foto copy kartu penduduk atau surat surat kuasa keterangan Kependudukan Pemberi Kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi RI No.1 tahun 2021, yang menyatakan “Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan Kependudukan Pemberi Kuasa”

2. Belum dilampiri dengan foto copy pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian hukum dan hak azasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Komisi Informasi No 1 Tahun 2021, yang menyatakan (4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan foto copy pendirian badan hukum yang telah mendapat kan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

3. Tidak menjelaskan tujuan penggunaan informasi secara rinci, sebagaimana diatur dalam Peraturan Informasi No.1 Tahun 2021 Pasal 293 isi surat dari Dinas PUPR Kabupaten Ngunjuk ditujukan kepada Wartawan Bidik Nasional (BN).

Perlu diketahui, bahwa tugas seorang wartawan saat menulis sebuah berita dan akan diterbitkan kemudian terpublikasi harus dilakukan secara berimbang dan melalui beberapa tahapan yang diisyaratkan diantaranya melalui Konfirmasi ke Nara sumber untuk mencari informasi, lalu cek and ricek terkait kebenaran infomasi.

Hal tersebut termaktub dalam aturan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan pedoman bagi insan media dalam menjalankan tugasnya dalam mencari, mendapatkan, menyimpan informasi baik melalui wawancara ataupun berbentuk data yang di tulis untuk selanjut dipublikasikan. Sehingga apa yang disuguhkan merupakan fakta, berimbang (sesuai UU no 40 Tentang Pers pasal 1 tentang keseimbangan isi berita dan para pihak) dan tidak menimbulkan fitnah maupun berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku.

Bila dianalisa surat dari Dinas PUPR Kabupaten Ngunjuk dengan beralkasan mengaitkan persyaratan bukan wartawan konfirmasi harus di lengkapi foto copy KTP, surat kuasa, surat keterangan dari Hukum dan HAM, legalitas media dan macem- macem itu sudah kelihatan bahwa sengaja untuk mempersulit tugas jurnalis, untuk tidak mendapatkan informasi yang didapat dari pihak dinas PUPR Kabupaten Ngunjuk.

Seharusnya keberadaan Insan Pers ini tentunya sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi yang benar dan selain itu dapat memberikan edukasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran maupun salah persepsi dalam pemberitaan kepada masyarakat. (tok)


 DIREKTORAT
 JENDERAL
 BEA DAN CUKAI

 PEMERINTAH
 KABUPATEN
 JEMBER

 SATUAN POLISI
 PAMONG
 PRAJA

LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL

KE KANTOR BEA DAN CUKAI JEMBER
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JEMBER TERDEKAT!!!

KONTAK PENGADUAN

   @beacukaijember

  Beacukai Jember

Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember
0821-4398-4393 (Telp & WA)

CIRI - CIRI ROKOK ILEGAL



 Rokok
Pita Cukai
Palsu

 Rokok
Pita Cukai
Berbeda

 Rokok
Pita Cukai
Bekas

 Rokok
Polos / Tanpa
Pita Bea Cukai

GEMPUK ROKOK ILEGAL

SANKSI ROKOK ILEGAL : PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan /atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar



BAMBANG SAPUTRO, SH, M.SI
KEPALA SATPOL PP KABUPATEN JEMBER



ASEP MUNANDAR, SE., M.SI
KEPALA KANTOR BEA CUKAI JEMBER